



- Yudi Suparyanto
- Khilya Fa'izia
- Aprilia Nur Kurniawati

MENGACU:

Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016
tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
dan

Permendikbud RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kunci Jawaban dan Pembahasan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran Wajib

**SMA/MA
Kelas**

X

Semester 1

PT Penerbit Intan Pariwara

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara.....	3
A. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila, 3	
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 6	
C. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 9	
BAB II Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945	18
A. Wilayah Negara Indonesia, 18	
B. Warga Negara dan Penduduk Indonesia, 20	
C. Agama dan Kepercayaan, 22	
D. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, 24	
Penilaian Tengah Semester 1.....	29
BAB III Lembaga Negara	35
A. Struktur Politik di Indonesia, 35	
B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara, 37	
C. Penerapan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>), 39	
BAB IV Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945	46
A. Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, 46	
B. Kewenangan Pemerintah Pusat, 48	
C. Pemerintah Daerah, 49	
D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, 51	
Penilaian Akhir Semester 1	58
Remedial Semester 1	63
Kunci Jawaban dan Pembahasan Remedial Semester 1	69

BAB I

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara

A. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Pada hakikatnya Pancasila yang terdiri atas sila-sila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan organis yang pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar manusia, sebagai pendukung dari isi dan inti sila-sila Pancasila yakni berupa hakikat manusia monopluralis.

2. **Jawaban: e**

Nilai Pancasila dikatakan bersifat objektif karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran universal.

3. **Jawaban: d**

Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, dan semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila menjadi sumber acuan dalam bertindak laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

4. **Jawaban: d**

Nilai dasar ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Nilai ketiga dikembangkan dengan maksud untuk mencapai tujuan nasional ke arah persatuan dalam kebulatan tekad untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Banyak makna

yang terkandung dalam nilai persatuan Indonesia antara lain memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia serta rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

5. **Jawaban: a**

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai alinea III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Selain itu, nilai pada sila pertama Pancasila sesuai pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

6. **Jawaban: b**

Makna nilai kemanusiaan yang adil dan beradab seperti berikut.

- 1) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- 2) Saling mencintai sesama manusia.
- 3) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 4) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 5) Tidak semena-mena terhadap orang lain.

7. **Jawaban: e**

Pancasila merupakan hasil dari keberagaman, toleransi, dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila digunakan sebagai sarana pemersatu semua komponen masyarakat, agama,

suku, dan kebudayaan. Dengan dasar negara Pancasila, semua komponen bangsa dapat menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur.

8. **Jawaban: e**

Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Contoh penerapan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut.

- 1) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah.
- 3) Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan.

9. **Jawaban: c**

Sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, atau paling tepat bagi kehidupannya. Dengan keyakinan tersebut, Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Contoh penerapan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut.

- 1) Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Mengembangkan kebudayaan nasional.
- 3) Mencintai produk dalam negeri.

10. **Jawaban: d**

Toleransi antarumat beragama merupakan salah satu wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peri kehidupan beragama harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan hidup, seperti yang ditunjukkan Mona dan Ikhsan.

11. **Jawaban: d**

Upaya paling tepat untuk membantu korban gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah mengumpulkan sumbangan dan menyalurkannya kepada para korban. Bukan hanya siswa, seluruh masyarakat umum ikut membantu memberikan bantuan sehingga dapat meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah gempa.

12. **Jawaban: a**

Perasaan senasib sepenanggungan merupakan perasaan yang sama ketika bangsa Indonesia sedang mengalami musibah, menjadikan kita bersatu. Bersatu padu dan bersama-sama membantu para korban yang mengalami musibah dilakukan tanpa memandang perbedaan. Tujuan memberi bantuan tersebut adalah meringankan beban penderitaan para korban bencana alam.

13. **Jawaban: d**

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai berikut.

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Cinta tanah air dan bangsa.
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

14. **Jawaban: e**

Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama, baik hak maupun kewajiban dirinya dan orang lain. Kebebasan mengemukakan pendapat pada keluarga Rendi didasari oleh hati nurani yang luhur. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila terutama sila keempat dan menunjukkan sikap demokratis. Contoh sikap demokratis antara lain menerima kritik dan saran dari orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta menyampaikan pendapat di muka umum dengan baik dan sopan.

15. **Jawaban: d**

Salah satu nilai keadilan adalah menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain dapat dilakukan dengan cara memberikan pujian. Selain itu, cara menghargai hasil karya orang lain dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi dan merawat hasil karya orang lain agar tidak rusak.

16. **Jawaban: d**

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila sebagai berikut.

- 1) Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Menjalani kerja sama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan.

- 3) Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa.
- 4) Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 5) Memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia.
- 6) Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

17. **Jawaban: b**

Pancasila dapat menerima dan menghargai perbedaan, termasuk dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, ada beberapa sikap yang harus kita hindari agar toleransi antarumat beragama dapat terbina. Sikap yang harus kita hindari antara lain mencampuradukkan ajaran agama, sikap fanatik yang berlebihan, dan sikap tidak peduli terhadap agama lain.

18. **Jawaban: d**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebagai contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain membiasakan tolong-menolong dan toleransi antarumat beragama.

19. **Jawaban: d**

Dalam musyawarah atau diskusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebagai contoh pendapat disampaikan dengan cara yang sopan, pendapat pribadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, dan pendapat yang disampaikan tidak menyinggung orang lain. Selain itu, kita perlu terbuka terhadap pendirian dan pendapat orang lain.

20. **Jawaban: b**

Makna yang terkandung dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
- 2) Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.
- 3) Pengambilan keputusan bersama mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

- 4) Menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.
- 5) Bertanggung jawab melaksanakan keputusan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Kerukunan hidup dalam kehidupan beragama dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut.

- a. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
- b. Saling menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antaragama, dan antarumat beragama.
- c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

2. **Jawaban:**

Dalam sila kedua Pancasila terdapat suatu nilai yang mencerminkan sikap hormat-menghormati antarbangsa dan negara. Sikap ini perlu dibina karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Demikian pula dengan bangsa Indonesia yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan bangsa lain. Oleh karena itu, setiap bangsa harus saling menghormati dan bekerja sama.

3. **Jawaban:**

Pada hakikatnya makna nilai persatuan adalah satu yang artinya bulat tidak terpecah. Persatuan berarti bersatunya corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Bagi bangsa Indonesia prinsip persatuan menuntut adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Persatuan dalam pengertian modern adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat.

4. **Jawaban:**

Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat antara lain pendapat disalurkan melalui jalur yang benar, pendapat pribadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, dan pendapat yang disampaikan tidak menyinggung orang lain, serta terbuka terhadap pendirian dan pendapat orang lain.

5. **Jawaban:**

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Oleh

karena itu, keadilan meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani dan keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan materiel dan spiritual).

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam fungsi, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Angka 1) menunjukkan kekuasaan legislatif, angka 4) menunjukkan kekuasaan federatif, dan angka 5) menunjukkan kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu.

2. **Jawaban: a**

Menurut John Locke kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, mengawasi, dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan eksekutif dalam suatu negara terletak pada kepala pemerintahan, kepala negara, dan lembaga peradilan negara.

3. **Jawaban: c**

Menurut John Locke kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau berhubungan dengan luar negeri. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan ini adalah kedutaan dan atase negara. Termasuk di dalamnya kementerian luar negeri suatu negara.

4. **Jawaban: a**

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi. Konsep kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu dikenal dengan istilah *Trias Politika*. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
- 3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang.

5. **Jawaban: a**

Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang dan biasanya kekuasaan ini yang memegang penuh kekuasaan pemerintahan di dalam negeri dan hubungannya dengan luar negeri.

6. **Jawaban: b**

Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan seperti yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar."

7. **Jawaban: e**

Apabila ditelaah dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa undang-undang dasar Indonesia tidak akan pernah bisa berubah seluruhnya. Hal itu didasarkan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

8. **Jawaban: b**

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

9. **Jawaban: c**

Dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan ini jelas menunjukkan adanya sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

10. **Jawaban: a**

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi menurut Jimly Assidique ada bermacam-macam, salah satunya penentu/pembatas kekuasaan. Pembatasan kekuasaan diperlihatkan oleh ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut tersirat makna bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah MPR. Adapun presiden dan DPR tidak berwenang. Akan tetapi, dalam proses pengubahan dan penetapan undang-undang dasar harus melalui proses yang sesuai ketentuan undang-undang.

11. **Jawaban: c**

Mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi, MPR mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

12. **Jawaban: b**

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

13. **Jawaban: c**

Pada pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain. Dalam pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

14. **Jawaban: a**

Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur ketentuan tentang lembaga negara dan kekuasaan sebagai berikut.

No.	Lembaga Negara	Kekuasaan
1)	MPR	Mengubah undang-undang dasar
2)	DPR	Membuat undang-undang
3)	Presiden	Melaksanakan undang-undang
4)	MA	Mengawasi pelaksanaan peradilan
5)	BPK	Mengawasi keuangan negara

15. **Jawaban: a**

Sesuai pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

16. **Jawaban: e**

Proses pemberhentian presiden berada di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden. Jadi jelaslah bahwa jawaban yang benar ditunjukkan oleh pilihan e.

17. **Jawaban: e**

DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa. Hak menyatakan pendapat juga bisa digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

18. **Jawaban: b**

Dalam menjalankan tugas kenegaraan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Wewenang tersebut antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

19. **Jawaban: d**

Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan hakim agung melibatkan tiga lembaga sekaligus, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**.

20. **Jawaban: a**

Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran John Locke, yaitu untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.

2. **Jawaban:**

Hakikat dari pandangan Montesquieu tentang Trias Politika adalah pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Dengan pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu bahwa ketiga fungsi kekuasaan organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak. Bila tidak demikian, kebebasan warga negara menjadi terancam.

3. **Jawaban:**

Pemisahan kekuasaan (*separations of power*) adalah sistem kekuasaan setiap lembaga negara yang dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain tanpa memerlukan koordinasi.

4. **Jawaban:**

Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pembagian kekuasaan yang dijalankan bukan semata-mata membagi tanggung jawab dalam menjalankan praktik penyelenggaraan negara. Lebih dari itu, pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bersama-sama dalam satu sistem *checks and balances*.

5. **Jawaban:**

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

6. **Jawaban:**

Dalam melaksanakan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi (hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara) dan hak angket (hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan).

7. **Jawaban:**

Menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena beberapa faktor berikut.

- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan.
 - e. Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.
8. **Jawaban:**
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden.
9. **Jawaban:**
Tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti berikut.

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
 - c. Mengatur dan mengawasi bank.
10. **Jawaban:**
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Uraian dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

C. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**
Setiap nilai mempunyai nilai dasar, baik berupa hakikat, esensi, maupun makna yang terdapat dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Sebagai contoh hakikat Tuhan, manusia, dan makhluk lainnya.
2. **Jawaban: b**
Nilai kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban. Keadilan menunjukkan adanya keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan sosial, serta makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan. Keadaban menunjukkan keunggulan manusia dibanding makhluk lainnya.
3. **Jawaban: d**
Nilai keempat dari Pancasila adalah kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat ke-

bijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Sebagai contoh, para pendiri negara yang tergabung dalam wadah PPKI, sesaat sebelum melakukan sidang dalam waktu singkat bermusyawarah guna mengganti tujuh kata bunyi sila pertama Piagam Jakarta. Musyawarah dilakukan demi kebaikan bersama.

4. **Jawaban: a**
Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai prinsip keadilan masyarakat banyak. Jadi, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila lebih diarahkan pada konteks sosial.
5. **Jawaban: c**
Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia dan harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai ketuhanan menghasilkan nilai ketaatan, toleransi, dan spiritualitas. Nilai kemanusiaan

menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, dan penghormatan. Nilai persatuan menghasilkan nilai pengorbanan dan cinta tanah air. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai kesetaraan dan menghargai perbedaan. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, dan kemajuan bersama.

6. **Jawaban: b**

Peran Pancasila dalam berbagai bidang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, Pancasila sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan akan lebih mudah tercapai dan terwujud apabila Pancasila benar-benar diamalkan.

7. **Jawaban: c**

Nilai persatuan merupakan pengamalan nilai luhur sila ketiga Pancasila. Nilai persatuan ditunjukkan oleh pemuda-pemudi yang melakukan kegiatan pada soal. Mereka menanggalkan perbedaan yang ada dan bersatu mengadakan kegiatan kebudayaan demi memperingati hari Sumpah Pemuda. Sikap seperti ini sebaiknya diteladan dalam kehidupan sehari-hari.

8. **Jawaban: c**

Sila ketiga Pancasila berbunyi: "Persatuan Indonesia". Perwujudan sila ketiga Pancasila antara lain menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; serta cinta tanah air dan bangsa.

9. **Jawaban: b**

Pancasila mempunyai potensi yang dapat menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan alat pemersatu bangsa Indonesia.

10. **Jawaban: c**

Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dengan demikian, kita memiliki akal yang dapat digunakan untuk memupuk diri menjadi manusia berakhlak mulia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memupuk diri untuk berakhlak mulia merupakan contoh penerapan nilai sila pertama Pancasila.

11. **Jawaban: e**

Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

12. **Jawaban: c**

Pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, pemerintah berupaya menyalurkan kredit usaha kecil menengah melalui bank dan menggalakkan program produksi padat karya seperti pada pernyataan angka 2) dan 4). Adapun pernyataan angka 1) dan 5) merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan, sedangkan pernyataan angka 3) di bidang pendidikan.

13. **Jawaban: b**

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan keputusan harus berlandaskan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa kemanusiaan.

14. **Jawaban: c**

Hak atas kesejahteraan merupakan salah satu hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, masyarakat, dan bangsa dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapat jaminan sosial yang dibutuhkan. Selain itu, setiap orang berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang memberikan jaminan sosial kepada setiap orang menunjukkan adanya pemenuhan hak atas kesejahteraan.

15. **Jawaban: e**

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut.

- 1) Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

16. **Jawaban: c**

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian.

17. **Jawaban: e**

Setiap negara mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang menunjang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu yang berkaitan dengan fungsinya. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Contohnya, pemerintah menjadi fasilitator dan motivator dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

18. **Jawaban: e**

Sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara jelas.

19. **Jawaban: a**

Nilai dasar Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa atau nilai religiositas.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai humanitas.
- 3) Persatuan Indonesia atau nilai nasionalitas.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau nilai soverenitas.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai sosialitas.

20. **Jawaban: e**

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan hubungan antara negara dan agama serta hubungan antarumat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kebebasan beribadah, penghormatan kepada agama, kerukunan, dan kerja sama antarumat beragama.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif memiliki arti sebagai berikut.

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai.
- b. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara sehingga merupakan suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi.

2. **Jawaban:**

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
- b. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. **Jawaban:**

Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan. Dengan kata

lain, kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan.

4. **Jawaban:**

Sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia.

5. **Jawaban:**

Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Sila pertama Pancasila menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. **Jawaban: c**

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (tidak *chauvinistis*), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan.

3. **Jawaban: b**

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, keadilan pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan materiel dan spiritual).

4. **Jawaban: a**

Sesuai pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

5. **Jawaban: e**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak sebagai berikut.

- 1) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; serta
 - c) dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 4) Hak protokoler adalah hak DPR atas penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan.
 - 5) Hak imunitas adalah hak DPR untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan yang disampaikan dalam rapat.
6. **Jawaban: d**
DPD memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- 1) mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
 - 2) memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak dan agama,
 - 3) memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
 - 4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah, dan
 - 5) menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN, serta mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) maupun rancangan peraturan daerah (raperda).
7. **Jawaban: b**
Sebagai kepala negara presiden memiliki tugas dan wewenang antara lain menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, serta memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
8. **Jawaban: a**
Landasan hukum pembentukan kementerian negara adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan tersebut memuat bentuk kementerian Indonesia yang terdiri atas kementerian koordinator, kementerian, wakil menteri, dan staf khusus menteri.
9. **Jawaban: e**
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
10. **Jawaban: e**
Menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena beberapa faktor berikut.
- 1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.
 - 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - 4) Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan.
 - 5) Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden, misalnya memiliki status kewarganegaraan ganda.
11. **Jawaban: b**
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir seperti semua sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. **Jawaban: d**
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

13. **Jawaban: b**

Komisi Yudisial merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 24B ayat (1) yaitu "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

14. **Jawaban: a**

Ketentuan tentang BPK diatur dalam pasal 23E–23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

15. **Jawaban: c**

Nilai-nilai Pancasila akan menjadi sangat berarti jika nilai-nilai tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menaati norma dan peraturan yang berlaku merupakan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila.

16. **Jawaban: e**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan semakin deras arus informasi dari globalisasi, Pancasila memegang peranan penting, yaitu sebagai filter terhadap budaya asing yang masuk di Indonesia.

17. **Jawaban: a**

Kita hendaknya menjauhi sifat-sifat yang dapat memecah belah bangsa. Sebagai contoh sifat ekstrimisme. Sifat ekstrimisme adalah sifat yang menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sifat ekstrimisme dapat menumbuhkan benih-benih kekerasan. Indikasi ekstrimisme ini terjadi ketika seseorang mulai menutup dirinya untuk menerima perbedaan cara berpikir, serta merasa keyakinannya lebih baik dan benar.

18. **Jawaban: d**

Kita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, hendaknya dapat mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa tecermin dari penghormatan terhadap warga sekitar yang menyadari hak dan kewajibannya.

19. **Jawaban: b**

John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam fungsi. Ketiga fungsi kekuasaan negara menurut John Locke sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- 3) Kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri.

20. **Jawaban: c**

Mekanisme perubahan undang-undang dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

- 1) Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

21. **Jawaban: d**

Dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan

bersama. Ketentuan ini jelas menunjukkan adanya sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Eksekutif selain sebagai pelaksana undang-undang sekaligus terlibat dalam pembuatan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, secara umum kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

22. **Jawaban: e**

Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

23. **Jawaban: d**

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dipahami pihak-pihak yang diberi kewenangan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

24. **Jawaban: c**

Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

25. **Jawaban: d**

Kalimat "mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang rancangan undang-undang" menunjukkan kewenangan membentuk undang-undang. Membentuk undang-undang

merupakan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD.

26. **Jawaban: e**

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

27. **Jawaban: e**

Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia berkedudukan sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.

28. **Jawaban: c**

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, semua kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai ideologi Pancasila. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Apabila semua peraturan perundang-undangan sesuai nilai-nilai Pancasila, sistem hukum yang terbangun adalah sistem hukum Pancasila.

29. **Jawaban: c**

Sila keempat Pancasila merupakan demokrasi dengan sistem musyawarah mufakat. Berdasarkan pilihan di atas, pilihan yang paling benar karena mengandung isi sila keempat Pancasila adalah pilihan c. Musyawarah merupakan bagian dari sila keempat Pancasila.

30. **Jawaban: d**

Sistem hukum Pancasila hanya dianut oleh negara Indonesia. Hal tersebut karena sistem hukum Pancasila menitikberatkan pada ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara. Dengan demikian, sistem hukumnya pun akan disesuaikan dengan ideologi Pancasila.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

2. **Jawaban:**

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

3. **Jawaban:**

Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara presiden memiliki tugas dan wewenang antara lain menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, serta memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Sebagai kepala pemerintahan presiden memiliki tugas dan wewenang seperti memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan pejabat-pejabat publik, serta menyusun kabinet.

4. **Jawaban:**

Urusan tertentu dalam pemerintahan yang dilakukan setiap menteri sebagai berikut.

- Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

5. **Jawaban:**

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi dengan istilah Trias Politika yang meliputi kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang; kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang; serta kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang.

6. **Jawaban:**

UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias Politika sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, tetapi menganut

sistem pembagian kekuasaan. Berikut tiga alasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan.

- UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
- UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas tiga bagian dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian.
- UUD NRI Tahun 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, akan tetapi dibagi kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (2).

7. **Jawaban:**

Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam pemerintah Indonesia. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan. Oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, seperti pendapat Kaelan. Menurut Kaelan sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.

8. **Jawaban:**

Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara jelas.

9. Jawaban:

Nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini kebenarannya. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

10. Jawaban:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut menunjukkan adanya bentuk penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik, yaitu adanya kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.

BAB II

Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945

A. Wilayah Negara Indonesia

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Wilayah negara diatur dalam pasal 25A UUD NRI Tahun 1945. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang bercirikan Nusantara. Pulau bercirikan Nusantara, artinya pulau-pulau di Indonesia berada di antara perairan. Wilayah perairan bukan merupakan pemisah, melainkan sebagai penghubung. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**.

2. **Jawaban: c**

Laut teritorial Indonesia merupakan wilayah laut milik Indonesia. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Negara-negara lain yang hendak memasuki wilayah teritorial ini harus mendapat izin dari negara Indonesia. Dengan demikian, Malaysia harus meminta izin kepada Indonesia ketika memasuki laut teritorial Indonesia.

3. **Jawaban: d**

Pemahaman tentang pengertian laut bebas, zona tambahan, landas kontinen, perairan Nusantara, dan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi kunci

menjawab soal ini. Laut Maluku berada di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Posisi Laut Maluku ini sesuai dengan pengertian perairan Nusantara. Perairan Nusantara atau perairan pedalaman, yaitu laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**.

4. **Jawaban: e**

Pemahaman terhadap pengertian laut teritorial dan pengukurannya sangat dibutuhkan untuk menjawab soal ini. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut (1 mil laut = 1,852 km) dari garis pantai terjauh yang menjorok ke laut. Dengan demikian, jika A melakukan reklamasi, garis pantai yang menjorok ke laut bertambah. Otomatis laut teritorial A bertambah seiring bertambahnya wilayah darat A. Berbeda dengan kondisi negara B. Pengukuran batas laut teritorial dilakukan dari pulau yang dikeruk pasirnya untuk dijual ke negara A. Jika pulau tersebut hilang, laut teritorial B akan berubah pengukurannya. Laut teritorial B jelas berkurang karena pengukuran akan dilakukan dari pulau yang tentunya tidak lebih jauh dari pulau semula.

5. **Jawaban: b**

Pernyataan pada soal menunjukkan deskripsi laut teritorial. Adapun laut bebas adalah laut lepas, wilayah laut yang tidak termasuk laut teritorial negara maupun laut pedalaman suatu negara. Zona tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan

lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan daerah yang berbatasan dengan laut bebas. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **b**.

6. **Jawaban: b**

Wilayah udara menjadi kata kunci dari soal ini. Pilihan jawaban **a–e** merupakan wujud wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola wilayah negara. Akan tetapi, wewenang di wilayah udara hanya terdapat pada pilihan **b**.

7. **Jawaban: c**

Ketentuan pidana pada soal dijatuhkan bagi setiap orang yang menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bapak/Ibu Guru dapat mencontohkan kasus penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan Pulau Nipa tenggelam. Di satu sisi daratan Singapura bertambah. Di sisi lain Indonesia kehilangan satu Pulau dan otomatis terjadi pengurangan wilayah karena Pulau Nipa merupakan pulau terluar yang dijadikan batas pengukuran laut teritorial dan wilayah laut lainnya. Artinya, telah terjadi pengurangan wilayah negara Indonesia. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **c**.

8. **Jawaban: a**

Wilayah negara menjadi kata kunci untuk menjawab soal ini. Pilihan **a–e** menunjukkan kerugian-kerugian yang diderita Indonesia. Akan tetapi, yang berhubungan dengan wilayah negara terdapat pada pilihan **a**. Pulau Nipa merupakan tanda batas kontinen negara Indonesia dengan Singapura. Jika tanda batas tersebut hilang, pastinya akan dilakukan pengukuran wilayah ulang. Otomatis wilayah Indonesia berkurang karena pengukuran wilayah laut teritorial tidak lagi dari titik Pulau Nipa. Indonesia harus mencari garis dasar lagi yang tentunya tidak lebih jauh dari Pulau Nipa. Adapun Singapura memiliki peluang besar mengklaim bahwa luas wilayahnya bertambah karena daratan mereka bertambah sehingga bertambah pula garis dasar untuk menentukan wilayah teritorial negara.

9. **Jawaban: d**

Perairan pedalaman, yaitu laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Pengertian laut pedalaman ini sesuai posisi Selat Karimata

dan Selat Makassar. Selat Karimata berada di antara Pulau Sumatra dan Kalimantan. Adapun Selat Makassar berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **d**.

10. **Jawaban: c**

Dalam menjaga kawasan perbatasan, setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling sedikit dua miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Setiap orang juga dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Wilayah perairan bagi Indonesia bukan sebagai pemisah antarpulau, melainkan sebagai penghubung. Dengan demikian, wilayah NKRI merupakan kesatuan yang utuh saling terhubung oleh wilayah perairan.

2. **Jawaban:**

Dalam menjaga kawasan perbatasan setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindah tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bagi yang melakukannya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

3. **Jawaban:**

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menegaskan tentang wilayah perairan Indonesia. Konvensi tersebut dilaksanakan di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Dalam konvensi itu dinyatakan bahwa

wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Nusantara, laut wilayah, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif.

4. **Jawaban:**

Gambar pada soal adalah tapal batas Indonesia dengan negara Malaysia. Wilayah sesuai gambar pada soal adalah wilayah daratan. Daratan merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dijadikan sebagai tempat permukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan.

5. **Jawaban:**

Garuda di dada memiliki makna Indonesia tetap di hati. Masyarakat perbatasan tetap cinta Indonesia sebagai warga negara Indonesia meskipun kebutuhan pokok didapat dari negeri Malaysia yang kemudian disebut dengan istilah "Malaysia di perut".

B. Warga Negara dan Penduduk Indonesia

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Ketentuan pada soal merupakan sebagian dari syarat naturalisasi bagi warga negara asing. Naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. **Jawaban: e**

Pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, pernyataan angka 1), 2), dan 3) gugur karena mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia. Wisatawan asing hanya berkunjung ke Indonesia untuk sementara waktu. Begitu juga dengan pelajar dari Jepang. Pilihan e menjadi jawaban yang paling tepat karena WNA atau orang asing yang bekerja di Indonesia tentunya akan menetap di Indonesia dalam jangka waktu lama. Selama ia menetap di Indonesia, ia termasuk penduduk Indonesia.

3. **Jawaban: e**

B.J. Habibie memperoleh kewarganegaraan Jerman melalui penganugerahan. Penganugerahan tersebut dikenal dengan *honorary citizenship* atau warga negara kehormatan. *Honorary citizenship* merupakan sebuah gelar kehormatan

yang diberikan sebuah negara kepada warga negara lain yang dianggap memberikan sumbangsih besar dalam bidang apa pun. Melalui gelar ini sang penerima gelar diperbolehkan menetap tanpa harus memiliki visa. Ia berkedudukan seolah-olah sebagai warga negara, tetapi ia tidak melaksanakan kewajiban seorang warga negara, misalnya membayar pajak penghasilan.

4. **Jawaban: e**

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, Jesica mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan memilih.

5. **Jawaban: a**

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, pada akhirnya tidak ada status kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia.

6. **Jawaban: b**

Ada dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa atau sering disebut naturalisasi pasif. Kepada siapa naturalisasi pasif

diberikan? Naturalisasi pasif atau istimewa diberikan kepada warga negara asing yang berjasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **b**. Adapun pilihan **a**, **c**, **d**, dan **e** merupakan syarat naturalisasi biasa.

7. **Jawaban: c**

Soal ini dapat dijawab dengan mudah jika diketahui asas kewarganegaraan yang dianut Brasil dan Jerman. Asas kewarganegaraan yang dianut Brasil adalah *ius soli*, sedangkan Jerman menganut asas *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Si A lahir di Jerman. Dengan demikian, berdasarkan asas *ius soli* Si A tidak dapat menjadi warga negara Brasil. *Ius sanguinis* merupakan asas kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Ayah dan ibu Si A bukan warga negara Jerman. Dengan demikian, Si A tidak dapat memiliki kewarganegaraan Jerman. Berdasarkan kedua asas tersebut Si A tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*).

8. **Jawaban: a**

A secara sadar dan atas kemauannya sendiri mengganti kewarganegaraan. Oleh karena itu, A kehilangan kewarganegaraan Indonesia. A tidak lagi mendapat hak dan memiliki kewajiban sebagaimana yang diembannya selama menjadi warga negara Indonesia.

9. **Jawaban: e**

Asas *ius soli* adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Negara yang menganut asas ini akan mengakui status kewarganegaraan seorang anak apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya. Asas *ius sanguinis* adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua anak tersebut memiliki status kewarganegaraan negara tersebut. Seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*), apabila negara asal orang tua menganut asas *ius soli*, sedangkan anaknya dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis*, anak tersebut tidak mendapatkan status kewarganegaraan.

10. **Jawaban: b**

Dalam penentuan asas kewarganegaraan, Indonesia menganut asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. Pemberlakuan asas ini secara bersamaan dapat mencegah seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Akan tetapi, pemberlakuan kedua asas tersebut mengakibatkan seseorang mendapat kewarganegaraan ganda. Untuk mengatasinya pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Dengan demikian, pada akhirnya tidak akan terjadi kewarganegaraan ganda di Indonesia.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pengertian warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 26 ayat (1) mengatur tentang pengertian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun penduduk Indonesia berdasarkan pasal 26 ayat (2) adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2. **Jawaban:**

Ada empat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan pernyataan memilih. Warga negara asing tidak mungkin mendapatkan kewarganegaraan melalui kelahiran, pengangkatan atau adopsi, dan pernyataan memilih. Cara yang dapat dilakukan WNA untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah melalui naturalisasi. Naturalisasi adalah cara memperoleh kewarganegaraan bagi warga negara asing dengan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. **Jawaban:**

Seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda atau *bipatride*. Sebagai contoh, X merupakan anak pasangan suami dan istri yang

berkewarganegaraan KM. Oleh karena suami istri tersebut bekerja dan tinggal di negara TK, X pun lahir di negara TK. Negara KM menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*, sedangkan negara TK menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Oleh karena asas yang dianut oleh tiap-tiap negara tersebut berbeda, X memiliki dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan KM dan kewarganegaraan TK.

4. **Jawaban:**

Ada sembilan faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan sebagai mana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di antaranya sebagai berikut.

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
- d. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- e. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

5. **Jawaban:**

Hak yang muncul adalah hak opsi (hak memilih kewarganegaraan) dan hak repudiasi (hak untuk menolak kewarganegaraan).

C. Agama dan Kepercayaan

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila diperhatikan dari kalimat pada pasal 29 ayat (1) tersebut ada pengakuan secara yuridis bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mengandung makna yang dalam bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

2. **Jawaban: e**

Kemerdekaan beragama dijamin dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Adapun pasal 17 ayat (2) menjelaskan tentang kementerian negara, pasal 18 ayat (2) menjelaskan tentang pemerintah daerah, serta pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

3. **Jawaban: e**

Kata kunci untuk menjawab soal ini adalah aturan operasional. Aturan operasional merupakan aturan pelaksana dari peraturan yang sifatnya umum seperti ketentuan dalam undang-undang dasar dan Pancasila. Dengan demikian, pilihan **a–d** gugur karena **a** merupakan landasan idiil, pilihan **b**, **c**, dan **d** merupakan landasan konstitusional. Pilihan **e** adalah jawaban paling tepat. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

4. **Jawaban: a**

Leitstar adalah bintang pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara Indonesia dalam mengejar kebaikan. Sila Pancasila yang menjadi bintang pembimbing adalah sila pertama. Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama akan menuntun arah bangsa dalam kebaikan, keadilan, dan kemakmuran.

5. **Jawaban: a**

Toleransi berarti bersikap toleran atau menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan suatu pendirian, baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, maupun kelakuan. Sikap ini jika diterapkan dalam kehidupan beragama akan menciptakan kerukunan. Kerukunan tercipta karena sikap toleran mampu meminimalisasi konflik berkaitan dengan keberagaman agama.

6. **Jawaban: e**

Kemerdekaan yang diberikan pemerintah dalam beragama bukan kemerdekaan sebebas-bebasnya, melainkan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Pemerintah tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Berbeda dengan negara liberal yang memberi kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama, bahkan tidak beragama sekalipun. Urusan beribadah memang menjadi urusan pribadi, tetapi masalah kebijakan keagamaan pemerintah tetap ikut campur seperti menjadi mediator dalam konflik dan mengundang kebijakan-kebijakan terkait kehidupan beragama.

7. **Jawaban: a**

Kerukunan antara umat beragama tecermin dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan ini meleburkan perbedaan yang ada. Seluruh masyarakat beragama apa pun bergabung dan membaur menjadi satu dalam gotong royong. Mereka bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Pilihan **b**, **c**, dan **d** menunjukkan kerukunan intern umat beragama. Adapun pilihan **e** menunjukkan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

8. **Jawaban: b**

Ateisme bertentangan dengan dasar negara dan hukum dasar negara. Baik dalam Pancasila maupun undang-undang dasar keduanya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ateisme merupakan paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dari ketentuan ini jelas bahwa ateisme bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

9. **Jawaban: b**

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, negara

Indonesia tidak menganut agama tertentu. Indonesia bukan negara agama. Semua agama yang diakui pemerintah dapat hidup dan berkembang. Pemerintah memperlakukan semua agama sama tanpa membedakan-bedakan.

10. **Jawaban: a**

Penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan agama dapat dilakukan dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Pilihan **b–e** merupakan perbuatan terpuji, tetapi tidak mengandung unsur penghormatan dan toleransi antarumat beragama.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkait kebebasan beragama, yaitu tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi warga negara diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.

2. **Jawaban:**

Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan hak orang lain yang juga memiliki hak sama untuk memeluk agama dan beribadah. Artinya, pemeluk agama satu dan lainnya harus saling toleran.

3. **Jawaban:**

Ateisme bertentangan dengan dasar negara dan hukum dasar negara yang mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila maupun undang-undang dasar mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ateisme merupakan paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dari ketentuan ini jelas bahwa ateisme bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama dan UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 29 ayat (1).

4. **Jawaban:**

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kehidupan umat beragama sebagai berikut.

- Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk.
- Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.

5. **Jawaban:**
Sikap menghormati dan menghargai merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Apabila setiap umat beragama selalu

mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai akan tercipta kerukunan antarumat beragama.

D. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Uji Kompetensi 4

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Bela negara diatur dalam pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Adapun pasal 26 dan 27 mengatur tentang warga negara dan penduduk, sedangkan pasal 29 mengatur tentang agama.

2. **Jawaban: e**

Bunyi pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pertahanan negara menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara.

3. **Jawaban: a**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Secara umum tugas kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

4. **Jawaban: d**

Pencurian ikan oleh nelayan asing merupakan bentuk penjajahan. Penjajahan merupakan segala upaya yang dapat memecah belah keutuhan negara. Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Tugas ini merupakan bentuk dedikasi dan bela negara anggota Tentara Nasional Indonesia pada bangsa dan negara.

5. **Jawaban: c**

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan

negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."

6. **Jawaban: e**

TNI, guru, dan polisi pada soal melakukan upaya bela negara sesuai bidang atau profesinya. Dengan demikian, jelas bahwa upaya bela negara pada soal merupakan contoh upaya bela negara dalam bentuk pengabdian secara profesi.

7. **Jawaban: c**

Tidak membuang sampah sembarangan merupakan sebuah upaya menciptakan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Melalui perilaku membuang sampah pada tempatnya berarti seorang siswa telah mematuhi peraturan di sekolah. Perilaku lain yang menunjukkan kepatuhan pelajar terhadap peraturan sekolah adalah menjaga ketertiban dengan mengenakan pakaian seragam sekolah dan memberi salam kepada Bapak/Ibu Guru.

8. **Jawaban: b**

Anda dalam hal ini pelajar, jadi pilihan yang dipilih berkaitan dengan upaya bela negara yang dapat dilakukan pelajar. Adapun upaya tersebut adalah mempelajari dan melestarikan budaya yang ada. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia tidak akan punah dan diakuisisi oleh negara lain. Memutuskan hubungan diplomatik, mengirimkan nota protes, memulangkan warga negara asing dari Indonesia tidak dapat dilakukan oleh seorang pelajar. Adapun menganggap budaya paling baik bukan sikap yang dianjurkan karena budaya negara lain harus dihormati.

9. **Jawaban: c**

Pernyataan pada soal merupakan pengertian pertahanan negara. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan dasar kemiliteran, Pendidikan Kewarganegaraan, pengabdian sebagai pasukan TNI, dan pengabdian secara profesi.

10. **Jawaban: a**

Pilihan **a–e** merupakan prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Akan tetapi, yang paling sesuai dengan konteks soal adalah pilihan **a**. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Seperti reaksi Indonesia terhadap spionase yang dilakukan negara lain. Indonesia tidak bersikap keras, melainkan mengupayakan jalur damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Usaha pertahanan negara berkaitan erat dengan upaya pembelaan negara karena upaya penyelenggaraan pertahanan negara merupakan wujud upaya bela negara. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

2. **Jawaban:**

Prinsip yang dianut negara Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan informasi tersebut adalah bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil.

3. **Jawaban:**

Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

4. **Jawaban:**

Upaya bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian secara profesi. Sebagai contoh, tim SAR melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang dan para nelayan tidak menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan.

5. **Jawaban:**

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Dalam konferensi hukum laut internasional di Jenewa (Swiss) 1958, Indonesia mengajukan konsepsi *archipelago* (negara kepulauan) dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil. Dalam forum internasional tersebut

pemerintah Indonesia menyampaikan konsepsi mengenai wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia merupakan bagian perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Indonesia.

2. **Jawaban: d**

Indonesia adalah negara yang sangat strategis. Wilayah Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan internasional. Hal tersebut karena letak geografis Indonesia berada di tengah negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Palau, Timor Leste, dan Papua Nugini. Oleh karena itu, posisi Indonesia sebenarnya diapit oleh negara-negara tersebut. Berdasarkan soal tersebut, Indonesia tidak berbatasan secara langsung dengan negara Laos dan Brunei Darussalam.

3. **Jawaban: d**

Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara di Benua Asia dan Benua Australia. Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Palau, dan Filipina. Wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan dengan negara India. Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia.

4. **Jawaban: d**

Bentang alam tersebut menunjukkan wilayah daratan Indonesia dihubungkan oleh wilayah perairan. Contohnya, Selat Karimata yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Sumatra. Keberadaan perairan di antara wilayah darat sesuai dengan konsep Nusantara dalam Wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari dua, kata yaitu *Nusa* dan *antara* yang berarti adanya perairan di antara pulau (daratan). Dengan demikian, jelas bahwa bentang alam tersebut membuktikan Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara.

5. **Jawaban: a**

Indonesia merupakan negara kepulauan. Bukti bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dapat dilihat dari pernyataan **a**. Pilihan **a** memperlihatkan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Jumlah pulau tersebut sudah didaftarkan secara resmi ke PBB pada tahun 2012.

6. **Jawaban: a**

Pilihan **a–e** merupakan upaya menjaga kelestarian wilayah laut Indonesia. Akan tetapi, yang dapat dilakukan oleh nelayan adalah tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Pukat harimau berbahaya bagi eksistensi biota laut.

Tidak menggunakan pukat harimau berarti telah turut andil dalam menjaga kelestarian wilayah laut.

7. **Jawaban: e**

Indonesia memberlakukan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* secara bersamaan. Akibatnya, muncul kewarganegaraan ganda bagi anak yang orang tuanya berasal dari negara lain. Akan tetapi, kepemilikan kewarganegaraan ganda ini akan berakhir ketika anak tersebut sudah kawin atau sudah berumur 18 tahun. Anak tersebut memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat ketentuan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian, pada akhirnya tidak ada status kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia.

8. **Jawaban: e**

Hilangnya kewarganegaraan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Salah satu yang dapat menghilangkan kewarganegaraan Indonesia adalah karena keinginan orang yang bersangkutan untuk memperoleh kewarganegaraan di negara lain. Pemerintah menganut asas publisitas, artinya hilangnya kewarganegaraan Indonesia akan dipublikasikan di berbagai media agar seluruh masyarakat mengetahuinya.

9. **Jawaban: b**

Anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Status kewarganegaraan X didapat karena berdasarkan asas *ius sanguinis*, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada keturunan atau hubungan darah sehingga otomatis sang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Status kewarganegaraan Y diperoleh karena berdasarkan asas *ius soli*, penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada tempat kelahiran sehingga secara otomatis sang anak memperoleh kewarganegaraan Y karena lahir di negara Y. Dengan demikian, anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.

10. **Jawaban: c**

Pertempuran Surabaya merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada 10 November 1945 di Kota

Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme sehingga tanggal 10 November 1945 ditetapkan sebagai hari Pahlawan.

11. **Jawaban: d**

Contoh ancaman nonmiliter adalah berkembangnya paham yang kurang sesuai dengan ideologi Pancasila. Salah satu contoh ideologi yang kurang sesuai dengan Pancasila adalah ideologi liberal. Pancasila merupakan dasar negara yang juga sekaligus pandangan hidup atau ideologi negara. Oleh karena itu, kehidupan warga negara harus sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.

12. **Jawaban: a**

Pada pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila diperhatikan dari kalimat pada pasal 29 ayat (1) tersebut ada pengakuan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mengandung makna yang dalam bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

13. **Jawaban: a**

Pada tahun 1958 dilaksanakan konferensi hukum laut internasional di Jenewa. Indonesia mengajukan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi *archipelago* (negara kepulauan) dan mengusulkan tentang batas laut teritorial selebar 12 mil. Konsep Indonesia ini merupakan upaya untuk memperkuat hasil Deklarasi Djuanda dalam forum internasional yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 1957.

14. **Jawaban: a**

Apabila presiden mengabulkan permohonan kewarganegaraan seseorang, presiden akan menetapkan dalam keputusan presiden. Keputusan presiden tersebut ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat empat belas hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan.

15. **Jawaban: b**

Negara sekunder adalah negara yang memisahkan antara urusan agama dengan politik. Indonesia bukan negara agama atau sekuler. Indonesia adalah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang beragama. Bukti bahwa Indonesia merupakan *religious nation state* adalah adanya pernyataan dari negara untuk mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia juga memasukkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pelaksanaan dasar negara yang juga memuat nilai-nilai agama.

16. **Jawaban: a**

Seseorang yang mengajukan permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia dapat diajukan kepada pemerintah Indonesia melalui menteri atau pejabat perwakilan. Batas waktu untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan diberikan paling lambat tiga bulan sejak permohonan tersebut diterima oleh menteri atau pejabat perwakilan. Tahap akhir apabila permohonan diterima adalah pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan menteri kepada pemohon paling lambat empat belas hari sejak tanggal keputusan menteri diterima.

17. **Jawaban: e**

Pilihan **a–d** kurang tepat. Wilayah perairan pada pilihan **a** merupakan penghubung bukan pembatas. Laut teritorial merupakan laut wilayah yang tidak berbatasan dengan laut bebas. Batas laut teritorial yang diajukan di Swiss 12 mil bukan 3 mil. Adapun deskripsi ruang udara yang benar ditunjukkan oleh pilihan **e** bukan **c**. Ruang udara yang menjadi wilayah Indonesia meliputi ruang udara di atas daratan dan di atas permukaan perairan Indonesia yang menjadi bagian kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. **Jawaban: b**

Orang yang ingin mengajukan permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Mulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan berkas permohonan, penerimaan atau penolakan permohonan, pengumuman, dan pemberian surat keputusan atas permohonan kepada pemohon.

19. **Jawaban: c**

Upaya bela negara ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI (persatuan Indonesia). Selain itu, upaya bela negara merupakan wujud cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga persatuan Indonesia.

20. **Jawaban: a**

Pilihan **a–e** merupakan upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Akan tetapi, yang paling sesuai untuk pelajar adalah dengan pendidikan kewarganegaraan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjelaskan bahwa "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya."

2. **Jawaban:**

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia.

3. **Jawaban:**

Berdasarkan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 bahwa jarak wilayah laut Indonesia 3 mil dihitung dari garis air laut setiap pulau. Apabila didasarkan pada peraturan tersebut, setiap pulau mempunyai laut wilayah dan antara pulau satu dan pulau lainnya

akan terbentuk lautan lepas. Ketentuan tersebut sangat melemahkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut yang seharusnya menjadi penghubung antarpulau, justru menjadi pemisah antarpulau.

4. **Jawaban:**

Prosedur permohonan pewarganegaraan di Indonesia diajukan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat. Selanjutnya, menteri meneruskan permohonan tersebut disertai pertimbangan kepada presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden bisa mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan presiden yang ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri. Pemberitahuan tentang keputusan presiden (keppres) kepada pemohon disampaikan paling lambat empat belas hari terhitung sejak keppres tersebut ditetapkan. Selanjutnya, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia pada negara Indonesia.

5. **Jawaban:**

Berdasarkan ilustrasi di atas A tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia karena dia belum memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seharusnya A menetap di Indonesia berturut-turut selama lima tahun atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut. Paspur yang masih berlaku menunjukkan A masih diakui sebagai warga Arab sehingga jika diberikan status kewarganegaraan Indonesia dia akan ber-kewarganegaraan ganda dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dengan dua hal tersebut permohonan pewarganegaraan A belum dapat diterima.

Penilaian Tengah Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Selain sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Selanjutnya, manusia berinteraksi secara kelompok atau bermasyarakat.

2. **Jawaban: e**

Pernyataan **a–d** merupakan penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan keputusan musyawarah sesuai pernyataan **e** merupakan cerminan sikap menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Sikap menghormati dan menghargai keputusan merupakan salah satu makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila memuat nilai kerakyatan yang mengandung pengakuan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera.

3. **Jawaban: a**

Sila pertama Pancasila mencakup nilai religi yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi, yaitu hak beragama. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut sebagai negara religius.

4. **Jawaban: e**

Tindakan yang dilakukan Rani seperti pada soal merupakan cerminan upaya mendapatkan keadilan. Perilaku memperjuangkan keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya merupakan salah satu makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.

5. **Jawaban: c**

Indonesia sebagai negara demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pernyataan ini selaras dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memegang kekuasaan untuk ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan bermanfaat untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang mufakat.

6. **Jawaban: c**

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara memuat nilai-nilai dasar pada setiap silanya. Kelima nilai tersebut saling terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

7. **Jawaban: d**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan jalan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah menunjukkan keadilan pembangunan tanpa tebang pilih pada segala sektor.

8. **Jawaban: d**

Nilai kemanusiaan mencerminkan sifat kemanusiaan manusia yang humanis, menjunjung tinggi martabat, dan mempunyai tata laku yang beradab. Semua itu terangkum dalam nilai luhur sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan sifat tersebut menunjukkan perbedaan antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

9. **Jawaban: e**

Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui musyawarah atau voting. Musyawarah merupakan penerapan nilai Pancasila sila keempat. Sila keempat bermakna bahwa pengambilan keputusan bersama harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat keputusan diambil dengan cara voting atau pengambilan suara terbanyak.

10. **Jawaban: e**

Salah satu wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah toleransi. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Sikap yang ditunjukkan oleh Doni kepada Ikhsan merupakan penerapan nilai sila pertama Pancasila, yaitu toleransi antarumat beragama.

11. **Jawaban: a**

Mekanisme perubahan undang-undang dasar secara tegas diatur dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa undang-undang dasar Indonesia tidak akan berubah seluruhnya. Hal ini didasarkan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

12. **Jawaban: c**

Lembaga legislatif merupakan suatu lembaga kenegaraan Indonesia yang mempunyai tugas membuat dan menciptakan undang-undang, serta berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaga legislatif juga mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

13. **Jawaban: b**

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

14. **Jawaban: a**

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang tidak mutlak seluruhnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dengan persetujuan presiden.

15. **Jawaban: b**

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses penegakan hukum harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, salah satunya dengan melaksanakan etika penegakan hukum. Masyarakat dapat menaati hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

16. **Jawaban: c**

Informasi pada soal menunjukkan penerapan Pancasila untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pokok-pokok pikiran Pancasila dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada pembatalan dan penundaan proyek yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

17. **Jawaban: c**

Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Itulah alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

18. **Jawaban: a**

Pilihan **a–e** menunjukkan contoh penerapan Pancasila dalam kebijakan di berbagai bidang. Penerapan Pancasila dalam kebijakan di bidang sosial budaya adalah mengendalikan sikap egoisme, sukuisme, primordialisme, dan *chauvinisme*. Contoh tersebut sesuai fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

19. **Jawaban: b**

Tujuan pelaksanaan etika pemerintahan dan politik adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Selain itu, untuk menumbuhkan suasana politik demokratis bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, dan tanggap akan aspirasi rakyat.

20. **Jawaban: a**

Gotong royong adalah kegiatan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong sebagai budaya Indonesia harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan negara, masyarakat dapat menerapkan sikap gotong royong untuk membantu program pemerintah demi lancarnya pembangunan.

21. **Jawaban: b**

Kata kunci untuk menjawab soal tersebut adalah frasa "... sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara ...". Nusantara dijadikan sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia. Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa berarti pulau dan antara berarti jarak di sela-sela dua benda (orang, tempat, batas, dan sebagainya). Nusantara diartikan sebagai gugusan pulau di antara lautan dengan arti lautan sebagai penghubung sehingga tercipta kesatuan wilayah yang utuh.

22. **Jawaban: e**

Dalam menjaga kawasan perbatasan setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara dan melakukan tindakan lain yang mengakibatkan batas negara tidak berfungsi. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

23. **Jawaban: a**

Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika terdapat dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil, batas landas kontinen bagi kedua negara ditentukan

dengan cara membagi dua. Kedua negara memiliki bagian yang sama jauhnya dari garis pantai masing-masing.

24. **Jawaban: e**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah darat negara. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tersebut pemerintah harus membangun dan membuat tanda batas wilayah negara di daerah perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara. Pilihan jawaban **a** dan **b** termasuk dalam wilayah perairan sedangkan pilihan **c** dan **d** termasuk dalam wilayah udara.

25. **Jawaban: a**

Prinsip *utipossidetis juris* artinya negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak atas wilayah bekas jajahan Belanda.

26. **Jawaban: b**

Pengertian warga negara Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 2 tersebut terdapat kalimat "orang-orang bangsa Indonesia asli". Maksud kalimat tersebut adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

27. **Jawaban: a**

Berdasarkan soal tersebut, sebelum menikah Andi memiliki dua kewarganegaraan, yaitu berdasarkan tempat kelahiran dan garis keturunan. Setelah menikah, Andi harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan melalui pernyataan yang dibuat secara tertulis. Andi memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi, Andi memperoleh kewarganegaraan melalui pernyataan memilih.

28. **Jawaban: d**

Selain dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Faktor penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan di-

jelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Salah satu penyebab hilangnya status kewarganegaraan menurut undang-undang tersebut adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.

29. **Jawaban: e**

Bangsa Indonesia memberi kebebasan kepada penduduk untuk beragama. Kebebasan beragama yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Penduduk tetap diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

30. **Jawaban: d**

Pengertian laut teritorial menjadi kunci untuk menjawab soal ini. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Berdasarkan pengertian tersebut konsekuensi bagi negara lain adalah mereka harus meminta izin kepada Indonesia jika memasuki laut teritorial Indonesia. Pilihan **a**, **b**, **c**, dan **e** gugur. Pilihan **a** gugur karena ketentuan tersebut untuk menentukan batas landas kontinen. Pilihan **b** gugur karena laut teritorial merupakan wilayah milik Indonesia sehingga negara Indonesia tidak perlu meminta izin kepada siapa pun. Pilihan **c** gugur karena pemanfaatan kekayaan laut di wilayah teritorial mutlak kedaulatan penuh Indonesia. Pilihan **e** gugur karena menyediakan jalur pelayaran damai merupakan kewajiban negara Indonesia bukan negara lain.

31. **Jawaban: b**

Secara geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Pulau Kalimantan.

32. **Jawaban: d**

Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 32–35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Salah satu cara seseorang mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah ia lepaskan adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri.

33. **Jawaban: d**

Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Semua agama di Indonesia mengajarkan kasih sayang. Rasa kasih sayang harus diterapkan di segala kehidupan termasuk di lingkungan sekolah. Salah satu contoh kasih sayang di sekolah adalah menasihati teman supaya rajin belajar.

34. **Jawaban: b**

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan jaminan kebebasan dan keamanan kepada semua warga negara. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut kewajiban negara tidak hanya mengatur soal pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan hak-hak beragama bagi semua penduduk.

35. **Jawaban: c**

Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia merupakan pengamalan bela negara. Penerapan lain dari sila tersebut sebagai berikut.

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Cinta tanah air dan bangsa.
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia.

36. **Jawaban: e**

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

37. **Jawaban: e**

Tentara Nasional Indonesia mempunyai peranan pokok dalam sistem pertahanan nasional. TNI berkedudukan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Berdasarkan

ketentuan pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

38. **Jawaban: c**

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan tersebut dapat dilakukan oleh pelajar. Salah satu contoh kegiatan bela negara yang dapat dilakukan pelajar adalah menjadi anggota Paskibraka. Paskibraka dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda bangsa terhadap tanah air Indonesia.

39. **Jawaban: d**

Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui berbagai bentuk. Salah satunya pengabdian secara profesi. Contoh pengabdian secara profesi adalah anggota PMI yang memberikan pertolongan dengan cepat.

40. **Jawaban: e**

Sikap patriotis adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apabila ada musibah seperti soal, sikap patriotis yang dapat kita tunjukkan adalah melakukan evakuasi terhadap warga. Melakukan evakuasi merupakan wujud keberanian dan sikap rela berkorban.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Makna yang terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut.

- Kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani.
- Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban.
- Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan.
- Memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial.

2. **Jawaban:**

Chauvinisme artinya mengagungkan bangsa sendiri secara berlebihan dan merendahkan bangsa lain. *Chauvinisme* merupakan bentuk nasionalisme dalam arti sempit. Istilah lain dari *chauvinisme* adalah *jingoisme* (patriotisme ekstrem dalam bentuk kebijakan luar negeri yang agresif).

3. **Jawaban:**

Sifat subjektif nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subjek yang menemukannya, nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat subjektif.
- Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang tepat bagi bangsa Indonesia, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia.
- Nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan hakikat sifat nurani bangsa Indonesia.

4. **Jawaban:**

Pancasila sebagai sumber nilai hukum mengandung pengertian bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.

5. **Jawaban:**

Lima sikap yang menunjukkan penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang pertahanan keamanan sebagai berikut.

- Mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengendalikan diri dari pencemaran nama baik pemerintah dan negara.
- Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan lingkungan.
- Siap membela negara jika dibutuhkan.
- Tidak memperlakukai aparaturnya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

6. **Jawaban:**

Kapal berbendera asing tersebut menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia karena jika diukur dari garis pantai (paling jauh menjorok ke laut) lokasi penangkapan ikan oleh kapal asing sejauh 200 mil laut. Kapal berbendera asing tersebut masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam

wilayah yurisdiksi, negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jika ada warga negara asing memasuki ataupun melakukan kegiatan di wilayah tanpa izin, pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan hukum.

7. **Jawaban:**

Naturalisasi istimewa adalah proses naturalisasi yang diberikan kepada orang yang berjasa kepada negara. Naturalisasi istimewa sering disebut dengan istilah naturalisasi pasif. Berikut contoh naturalisasi istimewa.

”Pak Ahmad warga negara Malaysia telah berjasa bagi Indonesia dalam memajukan teknologi transportasi. Pemerintah Indonesia memberi status warga negara kehormatan kepada Pak Ahmad. Selama tinggal di negara Indonesia, Pak Ahmad dianggap sebagai warga negara tetapi tidak perlu melaksanakan kewajiban warga negara, misalnya membayar pajak”.

8. **Jawaban:**

Hak-hak warga negara yang dijamin dalam pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)).
- b. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3)).

9. **Jawaban:**

Ateisme dilarang tumbuh di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan paham ateisme mengajarkan sebuah pandangan filosofi yang tidak memercayai keberadaan Tuhan. Tidak memercayai Tuhan berarti tidak beragama. Indonesia adalah negara beragama yang diatur dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 29 Bab XI UUD NRI Tahun 1945. Negara menjamin kebebasan untuk beragama sesuai peraturan tersebut.

10. **Jawaban:**

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan.



Lembaga Negara

A. Struktur Politik di Indonesia

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan keputusan bersama. Sistem politik suatu negara akan berbeda dengan negara lain sebab komponen yang terlibat dalam kegiatan politik juga berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari pihak yang memerintah dan luas ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah.

2. **Jawaban: d**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satu permasalahan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil pemilihan umum.

3. **Jawaban: b**

MK merupakan lembaga baru yang keberadaannya sebagai lembaga pelaksana keadilan bersama MA, sedangkan KY merupakan lembaga baru yang berkedudukan sebagai pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Selain dalam lembaga yudikatif, penambahan lembaga baru terjadi pada lembaga legislatif, yaitu DPD. DPD merupakan lembaga baru dalam lembaga legislatif berfungsi menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah yang semula dilakukan oleh utusan daerah dalam MPR.

4. **Jawaban: e**

Hubungan suprastruktur maupun infrastruktur politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat memengaruhi struktur politik dalam proses pembuatan kebijakan. Suprastruktur politik juga membutuhkan aspirasi berupa masukan atau kritikan masyarakat melalui infrastruktur politik.

5. **Jawaban: d**

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mengharapkan jabatan politik. Kelompok ini mengharapkan kebijakan sesuai tuntutan yang telah disampaikan. Sebagai contoh mahasiswa melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Selain kelompok kepentingan, terdapat kelompok lain yang tergolong dalam infrastruktur politik. *Pertama*, partai politik yang memiliki tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. *Kedua*, tokoh politik yang memengaruhi proses politik, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. *Ketiga*, kelompok penekan yang memberikan aspirasi demi kemajuan perpolitikan melalui lembaga kemasyarakatan. *Keempat*, media komunikasi politik yang berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

6. **Jawaban: c**

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Partai politik akan mengenalkan nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik kepada

masyarakat. Kegiatan sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui pendidikan politik dengan memberikan kursus atau pelatihan khusus.

7. **Jawaban: d**

Interest group nonasosiasi merupakan kelompok kepentingan yang tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya terlihat dari luar, dalam keadaan mendesak. Salah satu contoh *interest group nonasosiasi* adalah masyarakat alumni sekolah yang sama. Dengan demikian, pilihan **d** menjadi jawaban paling tepat. Pernyataan **a** dan **b** merupakan perwujudan *interest group institutional* karena dokter maupun guru memperjuangkan kepentingan anggota lembaga profesinya. Sementara itu, pernyataan **c** dan **e** merupakan perwujudan *interest group anomik* yang artinya kelompok ini melakukan aksi secara mendadak seperti demonstrasi atau penyampaian aspirasi dalam sebuah forum.

8. **Jawaban: a**

Rule making merupakan lembaga pembuat undang-undang. Lembaga ini terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Adapun presiden dan wakil presiden merupakan lembaga *rule application* yaitu lembaga pelaksana undang-undang. MA, MK, dan KY merupakan lembaga *rule adjudication* yaitu lembaga yang mengawasi dan mengadili pelaksanaan undang-undang.

9. **Jawaban: e**

Aspirasi masyarakat dapat berupa tuntutan, saran, maupun kritikan. Infrastruktur politik hendaknya menampung segala aspirasi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan disalurkan kepada pemegang kekuasaan demi memajukan perpolitikan sebuah negara. Selain itu, infrastruktur politik seharusnya tidak melakukan sinkronisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi, tetapi disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

10. **Jawaban: a**

Media komunikasi dapat menyampaikan informasi dari pemerintah dalam dunia pendidikan melalui pendidikan politik. Pendidikan politik dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Infrastruktur politik berperan sebagai lembaga yang memengaruhi suprastruktur politik dalam membuat kebijakan. Infrastruktur politik akan menampung aspirasi masyarakat berupa tuntutan, kritikan, dukungan, maupun saran. Aspirasi tersebut merupakan *input* yang akan ditampung dan disampaikan kepada suprastruktur. *Input* tersebut akan diproses oleh lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, proses yang telah dilakukan akan menghasilkan *output* berupa kebijakan politik yang berlaku untuk umum.

2. **Jawaban:**

Indonesia menganut pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan berarti membagi kekuasaan menjadi beberapa bagian yang saling terintegrasi dan tidak terpisahkan. Sistem pembagian kekuasaan akan menciptakan koordinasi atau kerja sama antar-lembaga negara. Sistem ini dianut karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Artinya, kekuasaan tidak berada pada satu pemerintahan, tetapi pada beberapa lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan.

3. **Jawaban:**

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah meniadakan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membentuk suatu dewan pertimbangan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

4. **Jawaban:**

Partai politik sebagai pengendali konflik harus membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Perlu adanya kompromi antara para wakil rakyat yang berasal dari partai politik untuk mendapatkan putusan tersebut.

5. **Jawaban:**

Sosialisasi politik dapat disampaikan melalui dua metode, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses mengenalkan dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang dianggap baik. Selain itu, pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan,

diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Sementara itu, indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik. Partai politik dapat melakukan pelatihan dengan penuh disiplin melalui berbagai forum pengarahan.

B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar adalah lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki beberapa kewenangan, seperti menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

2. **Jawaban: b**

Hak imunitas merupakan hak kekebalan anggota DPR untuk tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR telah sesuai peraturan perundang-undangan. Hak-hak MPR, DPR, maupun DPD secara tegas termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. **Jawaban: c**

Hubungan ketiga lembaga yang tepat, yaitu DPR membahas RAPBN bersama presiden dengan pertimbangan DPD. Ketentuan ini termuat dalam Bab VIII pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut berbunyi bahwa RAPBN yang diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan DPD karena DPD yang mengetahui situasi dan kondisi daerah. Apabila DPD tidak menyetujui, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

4. **Jawaban: a**

DPR mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
- 3) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Jawaban: d**

DPR berwenang membentuk undang-undang dan membahas RUU bersama presiden. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar merupakan kewenangan MPR. Sementara itu, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan MA. Selain itu, MA berwenang memberi pertimbangan kepada presiden terkait grasi dan rehabilitasi.

6. **Jawaban: e**

Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. **Jawaban: b**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah. Formulir C6 merupakan formulir yang diperuntukkan bagi pemilih. Formulir C6 berisi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

8. **Jawaban: d**

Memutuskan pembubaran partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang lain yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, yaitu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

9. **Jawaban: a**

Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 23E ayat (2) yang berbunyi "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya".

10. **Jawaban: c**

No.	Lembaga	Dasar Hukum
1)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004	Bank Indonesia
2)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	Komisi Pemberantasan Korupsi
3)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	Komisi Nasional HAM
4)	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011	Komisi Pemilihan Umum
5)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	MPR, DPR, DPD, DPRD

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pasangan antara organisasi dan tugasnya tampak pada tabel berikut.

No.	Organisasi	Tugas
1.	Kementerian koordinator	Membantu presiden menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, seperti bidang politik, ekonomi, dan keamanan.
2.	Kementerian	Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan.

3.	Wakil menteri	Membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.
4.	Staf khusus menteri	Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri.

2. **Jawaban:**

Mahkamah Agung memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji materiel atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dengan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. **Jawaban:**

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa lembaga peradilan di negara Indonesia. Peradilan adalah proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara. Berikut lingkungan lembaga peradilan tersebut.

- Peradilan umum, untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- Peradilan agama, untuk orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini menangani perkara seperti perkawinan, wakaf, dan waris.
- Peradilan militer, melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
- Peradilan tata usaha negara, menangani permasalahan sengketa tata usaha negara.

4. **Jawaban:**

- Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara sebagai berikut.
 - Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1)).
 - Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 14 ayat (2)).
 - Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (pasal 15).

b. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut.

- 1) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat (2)).
- 2) Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR (pasal 20 ayat (2)).
- 3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat (4)).

5. **Jawaban:**

BPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara; di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara; serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

C. Penerapan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berada di antara pemerintah dan perseorangan, baik perorangan atau kelompok yang berinteraksi secara politik, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa ciri masyarakat madani, yaitu terdapat norma dan nilai sosial, memiliki peradaban maju, memberikan ruang pada publik dengan bebas, memiliki supremasi hukum, dan terdapat partisipasi sosial.

2. **Jawaban: e**

Unsur-unsur pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu negara/pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. Ketiga unsur pemerintahan tersebut berkedudukan seimbang dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, ketiga unsur tersebut tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Setiap unsur mempunyai logika dan hukumnya sendiri sehingga mereka harus berjalan seiring, sejalan, dan saling mengendalikan. Apabila pemerintah memegang peran dominan, demokrasi dinilai tidak akan tumbuh karena dikendalikan oleh kekuasaan negara. Jika kekuasaan sektor swasta

dominan, kekuatan uang akan menentukan segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat madani lebih dominan, kekacauan akan berkembang tanpa arah yang jelas.

3. **Jawaban: a**

BPK dan KPK telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Menurut asas tidak menyalahgunakan kewenangan, pemerintah tidak memiliki kewenangan melebihi ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Kewenangan yang telah dimiliki pemerintah, tidak dapat diperuntukkan tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

4. **Jawaban: b**

Adanya pemasangan papan pengumuman di instansi pemerintahan menggambarkan prinsip transparansi. Papan pengumuman dapat dijadikan sarana untuk memberikan informasi kepada para warga. Dengan adanya transparansi masyarakat akan mendapatkan kepastian waktu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat juga akan mendapatkan informasi terkait kebijakan yang akan dibentuk atau sudah dibentuk oleh pemerintah.

5. **Jawaban: a**

Prinsip akuntabilitas berarti pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan, baik kepada atasan (secara vertikal) maupun kepada masyarakat (secara horizontal). Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dapat diberikan melalui pelayanan publik yang maksimal.

6. **Jawaban: c**

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya memberikan kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

7. **Jawaban: a**

Terciptanya pemerintahan yang baik tergantung pada pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah melakukan perbaikan pada pelayanan publik dan bersikap transparan, partisipasi masyarakat dapat meningkat. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat saling bertukar pemikiran yang positif untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan.

8. **Jawaban: b**

Faktor pendukung merupakan aspek-aspek yang mengarahkan sesuatu ke arah positif maupun negatif. Faktor pendukung tersebut, yaitu partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

9. **Jawaban: c**

Perbaikan di bidang hukum perlu dilakukan karena hukum memegang peranan penting dalam menciptakan *good governance*. Reformasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah. Apabila reformasi tidak dilakukan, hukum akan menjadi lemah dan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

10. **Jawaban: c**

Keterbukaan pemerintah akan memberikan kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pencapaian visi dan misi, pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh pemerintah, serta ikut mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Lembaga pemerintahan sesuai asas keterbukaan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- Fungsi partisipasi, ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri.
- Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, sebagai konsekuensi peran pemerintah sebagai alat bagi warga untuk mengawasi kinerja penguasa.
- Fungsi kepastian hukum, yang diwujudkan dengan memublikasikan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada para warga demi kepentingan umum.
- Fungsi hak dasar, yang dapat diperoleh para warga dengan adanya keterbukaan pemerintah. Hak-hak dasar para warga seperti hak pilih, hak berpendapat, dan hak berkumpul.

2. **Jawaban:**

Apabila amandemen tidak dilakukan maka beberapa peraturan menjadi tidak jelas. Adanya amandemen tidak hanya bertujuan untuk menambah atau mengurangi pasal-pasal yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Amandemen bertujuan untuk memperjelas beberapa peraturan, seperti pemilihan presiden langsung, susunan serta kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksan agung, dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

3. **Jawaban:**

Gambar pada soal identik dengan perilaku korupsi. Pemerintahan tidak akan dikatakan baik apabila masih ditemukan perilaku menyimpang tersebut. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan pencegahan (upaya preventif) dan penanggulangan (upaya represif). Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka. Adapun upaya penanggulangan dapat diatasi dengan memaksimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. **Jawaban:**

Pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik apabila menerapkan asas-asas yang dijadikan landasan menciptakan pemerintahan

yang baik. Selain itu, dalam proses pemerintahan, pemerintah harus bekerja sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal ini berarti pemerintah telah berlandaskan pada asas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya, pemerintah telah menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

5. **Jawaban:**

Faktor pendukung pemerintahan yang baik sebagai berikut.

- a. Partisipasi pemerintah.
- b. Partisipasi masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana.
- d. Sumber daya manusia.

Faktor penghambat pemerintahan yang baik sebagai berikut.

- a. Agenda politik, seperti amandemen UUD NRI Tahun 1945.
- b. Agenda ekonomi, seperti fungsi sektor keuangan dan perbankan yang perlu diperbaiki.
- c. Agenda sosial, seperti konflik antarkelompok sosial.
- d. Agenda hukum, seperti lemahnya sistem hukum.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Input dalam pemerintahan yaitu aspirasi masyarakat berupa tuntutan, saran, dan kritikan. Aspirasi tersebut akan diproses oleh lembaga pemerintahan dan/atau badan yang berwenang. Selanjutnya, proses tersebut akan menghasilkan *output* berupa kebijakan yang berlaku untuk umum.

2. **Jawaban: e**

Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan atas dasar teori Montesquieu (*Trias Politica*). Dalam konsep *trias politica*, kekuasaan suatu negara dibagi menjadi legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang). Akan tetapi, faktanya ajaran *trias politica* tidak diterapkan secara utuh dalam praktik kekuasaan pemerintahan Indonesia. Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Indonesia memiliki satu lembaga lagi yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dikuasai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. **Jawaban: d**

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden. DPA yang hanya berperan memberikan pertimbangan

kepada lembaga negara dirasa tidak efisien. Oleh karena itu, DPA ditiadakan karena tidak memiliki kewenangan hukum dan politik.

4. **Jawaban: e**

Supporting bodies adalah struktur politik yang mendukung *governing bodies* dan tidak melakukan fungsi pemerintahan. *Supporting bodies* maupun *governing bodies* merupakan pelaksana undang-undang (*rule application*).

5. **Jawaban: b**

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Rekrutmen politik berfungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan demi kelangsungan sistem politik.

6. **Jawaban: b**

Interest group institutional terdiri atas berbagai lembaga yang ada dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang yang menjadi anggota lembaga tersebut. Guru dapat memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya, seperti kenaikan gaji bagi guru honorer.

7. **Jawaban: b**

Struktur politik mencakup lembaga-lembaga formal dan juga informal yang berperan menjalankan sistem politik yang ada. Struktur politik di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

8. **Jawaban: e**
Media komunikasi politik berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Fungsi-fungsi di atas merupakan fungsi media komunikasi politik dalam menyebarkan atau memberitakan segala informasi yang berkaitan dengan politik.
9. **Jawaban: c**
Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik warga negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti membayar pajak, mengajukan tuntutan dan kritikan, serta melaksanakan keputusan. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik dalam rangka memengaruhi proses politik.
10. **Jawaban: a**
Kelompok penekan adalah sekelompok orang yang tergabung menjadi anggota lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok ini akan memberikan berbagai kritikan terhadap kebijakan maupun para pelaku politik dengan tujuan membuat perpolitikan menjadi maju.
11. **Jawaban: d**
Kewenangan melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden serta mengubah dan menetapkan undang-undang dasar merupakan kewenangan yang dimiliki MPR. Kewenangan lain yang dimiliki MPR tercantum dalam Bab II pasal 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945.
12. **Jawaban: c**
Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Putusan MK Nomor 04/SKLN-III/2006 menyatakan meskipun suatu lembaga negara tersebut telah ditetapkan oleh UUD 1945, namun apabila kewenangan yang disengketakan tersebut bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 maka sengketa yang demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
13. **Jawaban: a**
Salah satu kewajiban lembaga negara adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Lembaga negara hendaknya mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (termasuk kepentingan partai, daerah, ras, dan suku).
14. **Jawaban: d**
Hak protokoler adalah hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Pengawalan merupakan bentuk penghormatan terhadap anggota lembaga negara.
15. **Jawaban: a**
Lembaga MA, DPR, maupun presiden memiliki kewenangan mengajukan masing-masing tiga hakim konstitusi. Kesembilan hakim konstitusi tersebut nantinya akan ditetapkan oleh presiden.
16. **Jawaban: b**
Grasi merupakan pengurangan hukuman, sedangkan amnesti merupakan pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang dilakukan. Abolisi merupakan keputusan menghentikan pengusutan suatu perkara, sedangkan rehabilitasi merupakan tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena putusan hakim.
17. **Jawaban: a**
Komisi Yudisial terdiri atas tujuh orang anggota yang terdiri atas hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
18. **Jawaban: b**
Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik. Bank Indonesia bebas dari tugas-tugas titipan pemerintah yang merancukan perannya sebagai pemelihara moneter.
19. **Jawaban: e**
Wewenang Komisi Yudisial secara khusus diatur dalam pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Selain wewenang tersebut, Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik perilaku hakim.
20. **Jawaban: e**
Lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga eksaminatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Ketentuan secara khusus tentang BPK termuat dalam Bab VIIIA pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

21. **Jawaban: b**

Pak Gading merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden." Ketentuan pasal tersebut dicerminkan oleh ilustrasi pada soal yang terdapat dalam beberapa kalimat berikut.

- 1) Pak Gading seorang anggota sebuah lembaga negara.
- 2) Pak Gading ditunjuk oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.

22. **Jawaban: d**

Tindakan pada soal mencerminkan bahwa pemerintah telah menerapkan asas kepentingan umum. Menurut asas ini, pemerintah hendaknya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, baik di bidang pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, maupun ketertiban umum.

23. **Jawaban: e**

Menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dalam hal ini Pak Karim berarti telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Ia telah menyalahgunakan kewenangannya melebihi ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

24. **Jawaban: b**

Prinsip transparansi berarti bersikap terbuka terkait sebuah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan sebagai bukti pertanggungjawaban seseorang terhadap tugas yang telah diberikan.

25. **Jawaban: a**

Tersedianya rumah aspirasi membuktikan bahwa pemerintah berupaya menegakkan penyelenggaraan *good governance*. Melalui rumah aspirasi, setiap warga negara berhak menyampaikan tuntutan, kritikan, maupun saran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip yang dapat

menciptakan karakteristik pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mencerminkan pelaksanaan sila keempat dengan lambang kepala banteng. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan bentuk keikutsertaan dan keterlibatan warga negara dalam proses pencapaian visi dan misi pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pemerintah serta ikut mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

26. **Jawaban: d**

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan empat tahapan/rangkaian. Proses amandemen dilakukan berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir pada tahun 2002.

27. **Jawaban: c**

Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem secara drastis untuk perbaikan, baik di bidang sosial, politik, hukum, maupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Penataan konstitusi merupakan salah satu langkah perubahan atau perbaikan yang dilakukan pemerintah pada bidang hukum demi terciptanya pemerintahan yang baik.

28. **Jawaban: e**

Jaminan keadilan di bidang hukum sudah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Seluruh warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Apabila ada penegak hukum yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum tetap diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan di Indonesia akan berdiri tegak.

29. **Jawaban: c**

Media koran merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sebuah kebijakan. Informasi yang telah disampaikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan.

30. **Jawaban: a**

Supremasi hukum berarti pemerintah menempatkan hukum sebagai sumber pedoman dalam kehidupan di atas segala-galanya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu bentuk penerapan supremasi hukum.

B. Uraian

1. Jawaban:

Adanya amandemen berakibat pada penambahan atau pengurangan lembaga negara. Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen terdapat lembaga DPA yang berperan memberikan pertimbangan kepada presiden. Akan tetapi, karena dirasa tidak memiliki kewenangan hukum dan politik, lembaga ini akhirnya diadukan dan dibentuk lembaga-lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR sebelum amandemen memegang kekuasaan tertinggi negara. Akan tetapi, setelah amandemen MPR berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Ketentuan ini ditetapkan pada pasal 3 ayat (2). Dalam pasal tersebut MPR tidak lagi memilih atau mengangkat presiden dan/atau wakil presiden, tetapi MPR hanya melantik.

2. Jawaban:

Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Latar belakang dilakukan amandemen pada masa Orde Baru, yaitu kekuasaan yang sangat besar pada presiden dan adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir. Amandemen dirasa perlu dilakukan untuk menyesuaikan muatan materi pasal-pasal dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan amandemen akan memperjelas beberapa peraturan, seperti pemilihan presiden langsung, susunan serta kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian Kejaksaan Agung, dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Contohnya, pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak". Pasal tersebut kemudian dilakukan perubahan pada amandemen ketiga yang termuat dalam pasal 6A ayat (1) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat."

3. Jawaban:

Proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut.

- Legitimasi elite politik.
- Masalah kekuasaan.
- Representatif elite politik.
- Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dan perubahan politik.

4. Jawaban:

Jika presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, pelaksana tugas kepresidenan digantikan oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Presiden dan wakil presiden baru dipilih dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian, negara akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden baru pada sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

5. Jawaban:

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Berdasarkan pasal tersebut, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang tersebut kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mekanisme pembahasan rancangan undang-undang dibahas dalam pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.

6. Jawaban:

Partisipasi masyarakat yang dominan akan menimbulkan kekacauan. Pemerintahan akan berkembang tanpa arah yang jelas karena tidak ada peran pemerintah yang mengendalikan kekuasaan negara.

7. Jawaban:

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas pemerintahan yang baik sebagai berikut.

- Kepastian hukum, artinya pemerintah tidak dapat menarik kembali keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
- Kecermatan, artinya pemerintah hendaknya memperhatikan nasihat yang diberikan oleh para ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan sebuah keputusan. Akan tetapi, pemerintah memiliki hak untuk menolak nasihat tersebut.
- Kepentingan umum, artinya pemerintah harus memperhatikan kepentingan umum sebelum bertindak.

8. **Jawaban:**

Adanya asas-asas pemerintahan yang baik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Masyarakat dapat menggunakan asas tersebut sebagai landasan hukum apabila pemerintah bertindak tidak sesuai kewenangan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

9. **Jawaban:**

Asas dan prinsip pemerintahan yang baik harus dilaksanakan oleh pemerintah secara beriringan. Apabila pemerintah hanya menerapkan beberapa asas pemerintahan, pemerintahan yang baik akan sulit terwujud. Asas-asas maupun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik memiliki hubungan saling

terintegrasi dalam sebuah sistem. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaksana suatu kekuasaan memegang peran yang dominan dalam mengendalikan kekuasaan negara.

10. **Jawaban:**

Gambar pada soal mencerminkan bahwa segala aspirasi yang masuk dari masyarakat, apabila tidak ditanggapi serius oleh pemerintah akan terbuang sia-sia. Asas maupun prinsip pemerintahan yang baik harus dijadikan pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Mengingat aspirasi masyarakat berupa tuntutan, saran, maupun kritikan dapat mendorong pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.



Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

A. Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Presiden melimpahkan wewenang kepada gubernur merupakan bentuk pelaksanaan asas dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang yang diberikan presiden kepada gubernur akan mengamankan pelaksanaan kebijakan pusat dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi.

2. **Jawaban: c**

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat paham tentang politik. Masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu contoh pelaksanaan asas desentralisasi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3. **Jawaban: a**

Uraian pada soal menggambarkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berkat adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pada kenyataannya memang benar bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kedua unsur tersebut harus berjalan beriringan supaya program-program otonomi daerah dapat berjalan lancar.

4. **Jawaban: d**

Mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan daerah berarti masyarakat sudah merespons positif kebijakan pemerintah daerah. Pola pikir

masyarakat akan berubah dengan mengetahui kebijakan daerah. Mereka lebih kritis menghadapi isu-isu sosial, khususnya kebijakan yang akan diberlakukan untuk daerahnya.

5. **Jawaban: b**

Semua keperluan mulai dari pembiayaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten X hanya sebagai penyelenggara. Akan tetapi, pemerintah kabupaten X harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek tersebut.

6. **Jawaban: a**

Tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah pada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota pada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan diserahkan kepada pemerintah di bawahnya disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

7. **Jawaban: e**

Bentuk kegiatan yang mencerminkan rasa syukur atas pelaksanaan otonomi daerah adalah mengawal pelaksanaan otonomi daerah supaya sesuai prosedur. Hal tersebut mencerminkan penerimaan terhadap bentuk otonomi daerah. Upaya yang harus dilakukan agar otonomi daerah tetap berjalan dengan baik adalah mengawal pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.

8. **Jawaban: d**

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

9. **Jawaban: b**

Tanggung jawab merupakan bentuk pendidikan karakter yang terdapat dalam tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan bentuk penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Setelah pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

10. **Jawaban: d**

Berdasarkan uraian pada soal, pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan segi positif terhadap masyarakat dan pemerintah. Banyak hal yang diperoleh dari sistem otonomi daerah, misalnya masyarakat lebih mudah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Manfaat pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.

- Semakin mudahnya hubungan masyarakat dengan pemimpinnya.
- Menciptakan suasana demokratis sampai ke tingkat daerah.
- Penyelenggaraan tentang pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dilaksanakan.
- Menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik.

2. **Jawaban:**

Otonomi daerah memungkinkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dilakukan

dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Masyarakat dapat terberdayakan dengan mendapatkan pengetahuan politik. Salah satu pemberdayaan tersebut adalah mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

3. **Jawaban:**

Wacana tersebut berisi tentang kegiatan peringatan hari otonomi daerah sebagai wujud dari refleksi bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung. Otonomi daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah guna mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Jawaban:**

Pelaksanaan otonomi daerah tidak jarang melahirkan gesekan atau konflik di daerah seperti kasus kerusuhan saat pemilihan kepala daerah karena masih terjadi banyak penyimpangan hingga sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mengatasi sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dibentuk sebuah Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

5. **Jawaban:**

Berita pada soal menunjukkan tentang keberhasilan pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan otonomi daerah melalui pengembangan program-program inovatif yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut sebagai wujud nyata dari pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, nasional, serta agama.

2. **Jawaban: e**

Fungsi pemberdayaan dilaksanakan pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dan memecahkan segala permasalahan hidup. Fungsi ini sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat memberdayakan dan mengelola sumber daya daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan.

3. **Jawaban: c**

Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap menjalankan tugas-tugas pertahanan. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan keamanan di Indonesia.

4. **Jawaban: a**

Negara yang diwakili oleh pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengaturan kehidupan politik warga negara. Bentuk pengaturan di bidang politik yang bisa dilakukan pemerintah antara lain membuat peraturan batas umur warga negara dalam pemilu, penetapan jadwal kampanye, dan membuat larangan menggunakan uang dalam kampanye pemilu.

5. **Jawaban: a**

Mendirikan lembaga peradilan merupakan urusan pemerintah pusat di bidang yustisi. Adapun contoh lain dari bidang yustisi antara lain mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian, serta memberi grasi dan rehabilitasi.

6. **Jawaban: e**

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, pemerintah dan warga negara harus satu pemahaman. Kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila pemerintah dan warga negara memiliki satu pemahaman. Sebagai contoh kebijakan yang dirasa berhasil dilakukan adalah pembuatan KTP elektronik.

7. **Jawaban: c**

Hingga saat ini masih terdapat kelemahan dalam pemberian pelayanan publik yang mengakibatkan belum terpenuhinya kualitas yang diharapkan masyarakat. Adanya indeks kepuasan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah. Indeks kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat.

8. **Jawaban: b**

Grasi merupakan kewenangan pemerintah pusat (presiden) dalam bidang yustisi. Kewenangan dalam bidang yustisi meliputi kegiatan mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian, memberikan grasi dan rehabilitasi; membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan lain yang berskala nasional.

9. **Jawaban: d**

Pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat agar berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi agar tercipta kompetisi yang sehat.

10. **Jawaban: b**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut.

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Pemerataan dan keadilan.
- Menciptakan demokratisasi.
- Menghormati serta menghargai berbagai kearifan nilai-nilai lokal dan nasional.
- Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

2. **Jawaban:**

Pelaksanaan urusan pertahanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai berikut.

- Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata.
- Menyatakan damai dan perang.
- Menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya.
- Membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan.
- Menetapkan kebijakan untuk wajib militer.
- Bela negara bagi setiap warga negara.

3. **Jawaban:**

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang menyatu membentuk sebuah organisasi dan bertugas membuat hukum atau undang-undang di daerah tertentu. Pemerintahan merupakan bentuk kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila disimpulkan, pemerintah merupakan orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik.

4. **Jawaban:**

Pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri negara.

5. **Jawaban:**

Fungsi pelayanan dilakukan pemerintah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penyedia jasa pelayan publik dan pelayan sipil termasuk layanan birokrasi. Dalam pelayanan fungsi ini, pemerintah memberikan pelayanan secara adil, tidak diskriminatif serta tidak memberatkan masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan yang sama. Artinya, semua orang mendapat hak yang sama untuk dilayani, dihormati, diakui, dan mendapat kesempatan yang sama (menghargai kesetaraan).

C. Pemerintah Daerah

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib dalam skala provinsi.

2. **Jawaban: a**

Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa adalah daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua.

3. **Jawaban: b**

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah, sedangkan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. **Jawaban: a**

Catatan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah menampilkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Hal tersebut terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi sebagai modal dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. **Jawaban: c**

Fungsi yang dimiliki oleh DPRD salah satunya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

6. **Jawaban: e**

Kewenangan pemerintah daerah terdiri atas perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan pendidikan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta pelayanan bidang ketenagakerjaan. Menentukan nilai mata uang dan menetapkan kebijakan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.

7. **Jawaban: c**

Pendapatan daerah bersumber dari beberapa hal antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan asli daerah, dan lain-lain pendapatan. Retribusi dari parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk pendapatan asli daerah. Selain retribusi, pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. **Jawaban: b**

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan pemerintahan serta ketertiban umum dan kepentingan masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja (satpol PP). Satpol PP merupakan perangkat

pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

9. **Jawaban: a**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Adapun perangkat daerah tersebut adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

10. **Jawaban: b**

Pembahasan rancangan perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Rancangan perda yang telah disetujui DPRD dan kepala daerah ditetapkan menjadi perda. Dengan demikian, rancangan perda penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak sebelum ditetapkan menjadi perda harus mendapat persetujuan dari DPRD Demak dan bupati sebagai kepala daerah tingkat kabupaten.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) dan perangkat daerah.

2. **Jawaban:**

Antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki kedudukan sejajar dan tidak saling membawahi. Adapun hubungan yang bersifat kemitraan berarti bahwa pemerintah daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra kerja yang saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi masing-masing. Hubungan tersebut tampak pada proses pembuatan kebijakan daerah berupa peraturan daerah.

3. **Jawaban:**

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Sebagai contoh DPRD kabupaten A menggunakan hak inter-

pelasinya meminta keterangan kepada kepala daerah (bupati) terkait masalah kekosongan kekuasaan. Hal ini karena bupati kabupaten A meninggalkan kabupaten tersebut selama tiga minggu untuk mengikuti pembekalan kepala daerah di ibu kota dan wakil bupati kabupaten A, melaksanakan ibadah haji. Hampir bersamaan keduanya meninggalkan kabupaten A sehingga dinilai sebagian anggota DPRD terjadinya kekosongan kekuasaan.

4. **Jawaban:**

Dalam pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur DIY, dinyatakan bahwa syarat bagi calon gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta, sedangkan bagi calon wakil gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku

Alam yang bertakhta sebagai wakil gubernur selama lima tahun terhitung sejak pelantikan. Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak terikat ketentuan dua kali periodisasi masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

5. **Jawaban:**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sering terjadi permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Upaya menyelesaikan permasalahan dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Secara hukum berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memutus sengketa hasil pemilu.

D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Uji Kompetensi 4

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur organisasi atau kelembagaan. Walaupun daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya, pemerintah dalam hal ini merupakan wakil pemerintah di daerah. Jadi, masih terjalin hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat di daerah, sedangkan pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan-peraturan dari pusat.

2. **Jawaban: e**

Penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas tiga kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintah. Kriteria eksternalitas, maksudnya penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pe-

merintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apabila bersifat regional, menjadi kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

3. **Jawaban: e**

Wacana tersebut berisi tentang rencana pemerintah untuk menarik kewenangan berkaitan tentang pertambangan dengan melakukan revisi undang-undang tentang pemerintah daerah. Hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. **Jawaban: c**

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas. Meskipun begitu, pemerintah daerah tetap mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintah pusat.

5. **Jawaban: c**

Menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sikap dan perbuatan baik sangat diinginkan rakyat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bersikap terbuka atas saran dan kritik yang membangun. Seorang pemimpin harus menerima saran dan kritik tersebut dan menindaklanjuti sebagai bahan introspeksi diri.

6. **Jawaban: c**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.

7. **Jawaban: d**

Kementerian pusat melalui kementerian dalam negeri mengawasi jalannya kebijakan yang dilakukan oleh daerah, sedangkan pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan-peraturan dari pusat. Salah satu fungsi kementerian dalam negeri adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah.

8. **Jawaban: a**

Urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat karena mencakup kepentingan hidup masyarakat luas. Salah satu urusan agama adalah menentukan hari libur keagamaan.

9. **Jawaban: a**

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. **Jawaban: e**

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah kewenangan pemerintah pusat karena masalah-masalah tersebut berdampak bagi seluruh warga negara.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Setelah asas desentralisasi diterapkan pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur daerahnya dan membuat peraturan yang dibutuhkan dalam memajukan daerah. Dengan demikian, setiap daerah dapat berkembang dan mendukung tercapainya kebutuhan negara.

2. **Jawaban:**

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilakukan melalui beberapa cara seperti berikut.

- Pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tersebut.
- Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada wakil pemerintah di daerah atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
- Pemerintah pusat menegaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

3. **Jawaban:**

Faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut.

- Adanya fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- Adanya fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- Adanya fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat dan tidak memerlukan tingkat standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

4. **Jawaban:**

Perbedaan pengertian hubungan struktural dengan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut.

- Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur organisasi atau kelembagaan.

- b. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

5. **Jawaban:**

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sikap dan komitmen.

Sikap dan komitmen tersebut yaitu kapabilitas (kemampuan aparatur), integritas (mentalitas aparatur), akseptabilitas (penerimaan), serta akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab aparatur).

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan diserahkan kepada pemerintah di bawahnya disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

2. **Jawaban: d**

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan segi positif terhadap masyarakat dan pemerintah. Banyak hal yang diperoleh dari sistem otonomi daerah, misalnya masyarakat lebih mudah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik.

3. **Jawaban: a**

Berdasarkan prinsip tanggung jawab, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pada dasarnya pemberian otonomi bertujuan untuk memberdayakan dan memperlancar pembangunan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata berarti penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada sesuai situasi dan kondisi objektif di daerah. Adapun prinsip dinamis artinya pelaksanaan otonomi daerah selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

4. **Jawaban: d**

Pernyataan yang menunjukkan kelebihan desentralisasi ditunjukkan oleh angka 2), 3), dan 4). Adapun kelebihan pelaksanaan desentralisasi sebagai berikut.

- 1) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
- 2) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- 3) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- 4) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 5) Terjadi peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. **Jawaban: e**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan menurut asas otonomi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. **Jawaban: c**

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur daerahnya. Hak dan kewenangan tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh-

kan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

7. **Jawaban: e**

Kepala daerah berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk gubernur, dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk bupati/wali kota satu kali dalam satu tahun. Selain itu, kepala daerah berkewajiban menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

8. **Jawaban: b**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi beberapa hal berikut.

- 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur serta wakil gubernur.
- 2) Kelembagaan pemerintah DIY
- 3) Kebudayaan
- 4) Pertanahan
- 5) Tata ruang

9. **Jawaban: b**

Salah satu unsur pemerintah daerah adalah perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Adapun wali kota, gubernur, dan bupati disebut kepala daerah.

10. **Jawaban: d**

Kepala daerah merupakan pemimpin dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kepala daerah juga mempunyai tugas dan wewenang yang tidak ringan. Tugas dan wewenang tersebut merupakan tanggung jawab kepala daerah. Kepala daerah hendaknya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar memberikan hasil yang baik.

11. **Jawaban: c**

Menteri dalam negeri atas nama presiden melantik gubernur dan/atau wakil gubernur dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Gubernur atas nama presiden melantik bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota dalam sebuah sidang DPRD kabupaten/kota.

12. **Jawaban: a**

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa tugas DPRD antara lain membuat peraturan daerah bersama kepala daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

13. **Jawaban: d**

Kriteria esternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Apabila yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apabila bersifat regional menjadi kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

14. **Jawaban: c**

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dalam hal ini adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

15. **Jawaban: e**

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu wewenang pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib dalam skala provinsi. Peradilan/yustisi, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta moneter dan fiskal nasional merupakan urusan pemerintah pusat.

16. **Jawaban: a**

Pengertian otonomi daerah tersebut dikemukakan oleh Philip Mahwood. Beberapa tokoh lain juga mengemukakan pendapat mengenai otonomi daerah. Kusumaatmaja dan The Liang Gie mengemukakan pendapat mengenai asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Syarief Saleh berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. C.J. Franseen

berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan hak daerah setempat dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat.

17. **Jawaban: b**

Sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan asli daerah, dan lain-lain pendapatan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah. Selain pajak daerah, pendapatan asli daerah berasal dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

18. **Jawaban: b**

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. **Jawaban: c**

DPRD memiliki beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

20. **Jawaban: e**

Aktif dalam Gerakan Non-Blok merupakan urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Adapun politik luar negeri yang dilakukan pemerintah pusat antara lain mengangkat pejabat diplomatik dan warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.

21. **Jawaban: d**

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Pertahanan negara merupakan salah satu contoh urusan pemerintahan pusat yang bersifat nasional.

22. **Jawaban: e**

Tugas kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah sebagai berikut.

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan.
- 2) Mengajukan rancangan perda
- 3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 4) Menyusun dan mengajukan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan.

23. **Jawaban: d**

Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah. Masyarakat turut serta memberikan masukan bagi daerah dengan kepatuhan membayar pajak. Pemasukan daerah yang lancar akan mendorong kelancaran pembangunan daerah.

24. **Jawaban: c**

Pemerintah pusat berperan dalam menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

25. **Jawaban: a**

Berdasarkan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan asas-asas otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

26. **Jawaban: e**

Fungsi pemberdayaan berarti bahwa pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

27. **Jawaban: d**

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

28. **Jawaban: e**

Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

29. **Jawaban: a**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Artinya pemerintah mengalokasikan belanja dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung ke daerah tanpa melalui APBD dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

30. **Jawaban: a**

Tugas dari pemerintah adalah melayani masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain (diskriminatif) dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan (kepercayaan).

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

2. **Jawaban:**

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

3. **Jawaban:**

Setiap daerah diberi wewenang mengatur daerahnya sendiri karena setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, pemerintah daerah setempat yang lebih memahami kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan membentuk peraturan sendiri. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

4. **Jawaban:**

Pelaksanaan pesta demokrasi di setiap daerah selalu diwarnai dengan berbagai fenomena. Salah satu yang sering dilakukan adalah melanggar peraturan pemilu. Fenomena tersebut merupakan bentuk politik negatif yang dilakukan oknum calon kepala daerah kepada masyarakat. Perbuatan tersebut seharusnya dihindari oleh semua calon kepala daerah. Masyarakat sebaiknya tidak memilih calon kepala daerah yang melakukan kecurangan. Masyarakat harus cerdas memilih pemimpin. Salah satu cara untuk menentukan pilihan adalah dengan mempertimbangkan kompetensi dan prestasi yang dicapai oleh calon kepala daerah.

5. **Jawaban:**

Pengaturan tentang urusan pemerintahan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Penilaian Akhir Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. Jawaban: b

Makna sila persatuan Indonesia dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
- 2) Memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia.
- 3) Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4) Menjalani kerja sama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan.
- 5) Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.

2. Jawaban: d

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan lainnya.

3. Jawaban: a

Pelaksanaan kekuasaan negara dapat diterapkan sesuai sistem pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) yang artinya pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi satu sama lain tidak dipisahkan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi antarlembaga.

4. Jawaban: e

Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Jawaban: e

Makna yang terkandung dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti berikut.

- 1) Menerapkan kedermawanan kepada sesama.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menghargai hasil karya orang lain.
- 4) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- 5) Saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan.

6. Jawaban: b

Nilai Pancasila mengandung banyak makna. Salah satunya adalah kerja sama antarsesama. Salah satu bentuk kerja sama antarsesama adalah gotong royong. Kegiatan gotong royong tecermin dalam kegiatan kerja bakti, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

7. Jawaban: d

”Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dalam sila keempat Pancasila mengandung pengertian bahwa negara berdasarkan atas hakikat rakyat, tidak kepada individu atau golongan. Negara pada hakikatnya didukung oleh rakyat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan kata lain, keputusan yang diambil bermanfaat bagi rakyat.

8. **Jawaban: e**
Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, dan kesejahteraan seluruh bangsa. Sistem perekonomian yang sesuai pengimplementasian Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara jelas.
9. **Jawaban: b**
Uraian pada soal menjelaskan tentang wilayah udara yang disebut dengan teori penguasaan. Teori penguasaan menjelaskan bahwa kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atasnya secara fisik dan ilmiah. Teori ini menguntungkan bagi negara-negara berkembang.
10. **Jawaban: a**
Wilayah Indonesia di bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste tepatnya di Kabupaten Belu.
11. **Jawaban: d**
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Pasal tersebut mengandung makna bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
12. **Jawaban: d**
Dalam konsep Trikerukunan umat beragama salah satunya adalah menjaga kerukunan antarumat beragama. Kerukunan antarumat beragama dapat ditunjukkan Toni dengan memberikan bantuan sesuai kemampuan kepada tetangga yang tertimpa musibah meskipun tetangga tersebut berbeda agama.
13. **Jawaban: c**
Setiap warga negara harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan antarumat beragama. Untuk membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan Trikerukunan beragama. Tindakan yang sesuai Tri kerukunan beragama adalah menghargai dan menghormati setiap agama yang ada di Indonesia.
14. **Jawaban: b**
Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan undang-undang tersebut, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian secara profesi.
15. **Jawaban: a**
Warga negara Indonesia terkenal dengan sikap ramah tamah. Sikap ramah tersebut harus selalu kita tunjukkan kepada warga negara asing dalam upaya menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia.
16. **Jawaban: d**
Dalam soal diuraikan bahwa partai politik berhasil mengajak Danang menjadi anggota partai politik. Partai tersebut melakukan salah satu fungsi, yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
17. **Jawaban: b**
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Dalam cerita tersebut, yang menjadi anggota MPR adalah Danang dan Ani. Danang menjadi anggota DPR di Senayan, sedangkan Ani menjadi anggota DPD.
18. **Jawaban: e**
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Selain itu, DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
19. **Jawaban: c**
BPK bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 23E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23E ayat (2) berbunyi "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.” Pasal 23E ayat (3) berbunyi, ”Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang.

20. **Jawaban: c**

Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat memengaruhi suprastruktur politik sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan. Ada lima komponen infrastruktur politik, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi, dan tokoh politik.

21. **Jawaban: a**

Hukum memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu agar tercipta keadilan. Penegak hukum yang terbukti bersalah juga harus diberikan sanksi sesuai undang-undang.

22. **Jawaban: e**

Gambar pada soal merupakan papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Papan informasi/pengumuman dipasang sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada para warga sebagai wujud transparansi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada keraguan dalam masyarakat.

23. **Jawaban: c**

Sarana dan prasarana yang mendukung sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Teknologi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Candinata menjadi pendukung pelaksanaan pemerintahan. Teknologi tersebut mempermudah sarana komunikasi dan informasi antarperangkat desa dan masyarakat.

24. **Jawaban: b**

Tujuan otonomi daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

25. **Jawaban: e**

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

di Indonesia, salah satunya adalah nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*). Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah.

26. **Jawaban: b**

Urusan pemerintahan absolut khususnya urusan pertahanan ditunjukkan oleh angka **1)**, **3)**, dan **4)**. Urusan pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, serta bela negara bagi setiap warga negara.

27. **Jawaban: b**

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah angka **1)** dan **3)**, sedangkan angka **2)** dan **4)** merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

28. **Jawaban: b**

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

29. **Jawaban: d**

Berdasarkan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

30. **Jawaban: e**

Penyelenggara urusan pemerintahan selain tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Eksternalitas maksudnya penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pancasila sebagai sumber nilai mengandung pengertian bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia.

2. **Jawaban:**

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang religius. Hal ini karena sila pertama Pancasila mencakup nilai religi yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang mencakup hak asasi, yaitu hak beragama.

3. **Jawaban:**

Faktor penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan sebagai berikut.

- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
- Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

- Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.

4. **Jawaban:**

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara memikul kewajiban-kewajiban berikut. *Pertama*, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. *Ketiga*, mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Pengelolaan wilayah negara dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

5. **Jawaban:**

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pertahanan negara diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 seperti berikut.

- Pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- Pertahanan negara berfungsi mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

6. **Jawaban:**

Perbedaan suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai berikut.

- Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada.
- Infrastruktur politik adalah lembaga yang dapat memengaruhi suprastruktur politik sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat kebijakan.

7. **Jawaban:**

Wacana pada soal menunjukkan adanya sengketa pemilihan umum kepala daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pasangan calon yang kalah dapat menyelesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

8. **Jawaban:**

Supremasi hukum berarti pemerintah menempatkan hukum sebagai sumber pedoman dalam kehidupan di atas segala-galanya. Pemerintah hendaknya memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya, mengingat setiap orang dijamin kedudukannya oleh hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

9. **Jawaban:**

Perbedaan pengertian hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut.

- a. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur organisasi atau kelembagaan.

- b. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

10. **Jawaban:**

Prinsip eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apabila bersifat regional, menjadi kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan kutipan berita dan kriteria eksternalitas, wewenang terhadap urusan moneter menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini karena seluruh masyarakat Indonesia menggunakan mata uang rupiah untuk jual beli. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan dari penarikan uang tersebut berskala nasional. Dalam arti, berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Remedial Semester 1

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- 1) Menghargai hasil karya orang lain.
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa.
- 3) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 4) Saling mencintai sesama manusia.
- 5) Mengakui persamaan derajat.

Bentuk pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh angka

- a. 1), 2), dan 3)
 - b. 1), 2), dan 4)
 - c. 2), 3), dan 4)
 - d. 2), 3), dan 5)
 - e. 3), 4), dan 5)
2. Manfaat hormat-menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda adalah
- a. terjadinya diskriminasi antarumat beragama
 - b. terbinanya kerukunan hidup antarumat beragama
 - c. timbulnya intoleransi antarumat beragama dalam masyarakat
 - d. munculnya berbagai kasus penistaan terhadap agama tertentu
 - e. adanya pemaksaan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
3. Wujud rasa bangga sebagai bangsa Indonesia antara lain ditunjukkan dengan cara menggunakan produk dalam negeri, mencintai budaya Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wujud rasa bangga tersebut sesuai nilai Pancasila, yaitu
- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. persatuan Indonesia
 - d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh kekuasaan

- a. moneter
- b. yudikatif
- c. eksekutif
- d. konstitutif
- e. eksaminatif

5. Presiden memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan presiden tersebut sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu

- a. pasal 4 ayat (1)
- b. pasal 20 ayat (1)
- c. pasal 24 ayat (2)
- d. pasal 23E ayat (1)
- e. pasal 23E ayat (2)

6. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab tentang

- a. keadilan hukum
- b. keuangan negara
- c. kebijakan moneter
- d. pemerintahan negara
- e. penetapan undang-undang dasar

7. Menetapkan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh

- a. Komisi Yudisial
- b. Bank Indonesia
- c. Mahkamah Agung
- d. Mahkamah Konstitusi
- e. Dewan Perwakilan Rakyat

8. Salah satu faktor dalam negeri yang menjadi penyebab krisis multidimensi adalah
 - a. terjadinya ketidakadilan ekonomi
 - b. diberlakukannya sistem desentralisasi
 - c. tingginya tingkat toleransi antarumat beragama
 - d. berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa
 - e. adanya keteladanan para pemimpin bangsa dalam bersikap dan berperilaku
9. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan etika
 - a. keilmuan
 - b. sosial dan budaya
 - c. ekonomi dan bisnis
 - d. politik dan pemerintahan
 - e. penegakan hukum yang berkeadilan
10. Salah satu etika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk
 - a. menumbuhkan kesadaran tertib sosial
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - c. menciptakan suasana harmonis antar-kekuatan sosial politik
 - d. memberdayakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil
 - e. menegaskan pentingnya kesadaran melestarikan lingkungan hidup
11. Ketentuan mengenai wilayah, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Pernyataan ini membuktikan bahwa
 - a. ketentuan dalam undang-undang dasar mencakup segala aspek kehidupan
 - b. undang-undang dasar menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara
 - c. ketentuan dalam undang-undang dasar masih bersifat umum perlu aturan lebih khusus
 - d. undang-undang dasar menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara
 - e. undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan
12. Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayahnya terbentang luas dengan keindahan alam yang luar biasa. Luas wilayah Indonesia diabadikan dalam sebuah lagu berjudul
 - a. "Padamu Negeri"
 - b. "Indonesia Pusaka"
 - c. "Rayuan Pulau Kelapa"
 - d. "Bhinneka Tunggal Ika"
 - e. "Dari Sabang Sampai Merauke"
13. Wilayah laut Indonesia yang dikenal dengan sebutan laut wilayah adalah
 - a. laut teritorial
 - b. zona tambahan
 - c. landas kontinen
 - d. perairan Nusantara
 - e. Zona Ekonomi Eksklusif
14. Warga negara Indonesia dan bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut
 - a. rakyat
 - b. bangsa
 - c. penduduk
 - d. warga negara
 - e. warga negara asing
15. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Anak yang lahir dari seorang ayah WNA dengan ibu WNI.
 - 2) Anak yang lahir dari ayah dan ibu WNI.
 - 3) Anak yang lahir dari seorang ayah WNI dengan ibu WNA.
 - 4) Orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut.
 - 5) Orang bangsa asing yang dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pernyataan yang menunjukkan warga negara Indonesia ditunjukkan oleh angka

 - a. 1), 2), dan 3)
 - b. 1), 2), dan 4)
 - c. 2), 3), dan 4)
 - d. 2), 3), dan 5)
 - e. 3), 4), dan 5)

16. Seorang aktor dari tanah air berkesempatan berkarier di luar negeri. Agar kariernya berjalan lancar, ia berpindah kewarganegaraan. Aktor tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena
 - a. tidak melepaskan kewarganegaraan lain
 - b. masuk dinas tentara asing tanpa izin
 - c. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
 - d. bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut
 - e. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing
17. Seorang WNI menikah dengan WNA dan tinggal di Indonesia. Negara asal suaminya menganut asas *ius sanguinis*. Dengan demikian, jika anak mereka dilahirkan di Indonesia, status kewarganegaraannya, yaitu
 - a. ganda
 - b. tidak berkewarganegaraan
 - c. sesuai negara tempat ia lahir
 - d. mengikuti kewarganegaraan ibu
 - e. mengikuti kewarganegaraan ayah
18. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam *stelsel* aktif dikenal dengan hak. . . .
 - a. opsi
 - b. memilih
 - c. repudiasi
 - d. naturalisasi
 - e. dasar atau pokok
19. "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pernyataan tersebut tercantum dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yaitu
 - a. pasal 29 ayat (1)
 - b. pasal 29 ayat (2)
 - c. pasal 30 ayat (1)
 - d. pasal 30 ayat (2)
 - e. pasal 30 ayat (3)
20. Usaha pertahanan negara yang dapat dilaksanakan oleh seorang pelajar adalah
 - a. bergabung dalam tim SAR
 - b. menjadi anggota hansip dan kamra
 - c. mengikuti pelatihan dasar kemiliteran
 - d. mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan
 - e. mengabdikan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia

21. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sosialisasi kepada peserta didik kelas X di Kota Surabaya. Peserta didik kelas X dijadikan sebagai sasaran utama karena mereka merupakan calon pemilih pemula. Tindakan yang dilakukan KPU telah mencerminkan bahwa KPU sebagai infrastruktur politik telah menjalankan fungsinya, yaitu
 - a. menyeleksi calon pemimpin masyarakat
 - b. memadukan kepentingan yang beragam
 - c. memberikan pendidikan politik
 - d. menampung aspirasi
 - e. menyalurkan aspirasi
22. Simaklah bacaan berikut!

Pak Supri merupakan seorang wakil ketua di lembaga pemerintahan. Baru beberapa bulan menjabat, Pak Supri naik jabatan menjadi ketua di lembaga tersebut lantaran ketua terdahulu terjerat kasus korupsi. Ketika akan dilakukan pemilihan wakil ketua yang akan mendampingi Pak Supri, ia mengusulkan anaknya yang baru saja lulus kuliah menjadi calon wakil ketua. Selain itu, Pak Supri berharap akan lebih mudah memengaruhi kebijakan pemerintah apabila anaknya menjadi wakil ketua.

Berdasarkan bacaan di atas, Pak Supri berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah melalui perilaku

- a. kolusi
 - b. korupsi
 - c. nepotisme
 - d. penggelapan
 - e. pencucian uang
23. Menjelang pemilihan umum setiap partai politik diperbolehkan melakukan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi partai. Partai X menugasi tim kemenangan di setiap daerah untuk melakukan sosialisasi demi mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilu mendatang. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada perwakilan partai di daerah?
 - a. Daerah tersebut tidak memiliki kandidat dalam pemilihan umum.
 - b. Partai politik sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat.
 - c. Partai politik kalah saing dengan partai politik lain.
 - d. Calon wakil rakyat sulit melakukan politik uang.
 - e. Partai politik dapat dibubarkan.

24. MPR memiliki hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan sebab anggota MPR memiliki
- hak *budget*
 - hak angket
 - hak imunitas
 - hak protokoler
 - hak interpelasi
25. Dalam pemerintahan sering terjadi perubahan susunan kabinet, salah satunya pergantian menteri. Mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan
- MK
 - DPR
 - DPD
 - MPR
 - presiden
26. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas penting bagi perekonomian negara, khususnya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Lantas, siapa yang berkewajiban mengawasi kinerja Bank Indonesia?
- DPRD
 - DPD
 - DPR
 - BPK
 - MK
27. Simaklah berita berikut!

Pemkab Bintang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas pengelolaan keuangan yang telah dilaporkan. Raihan opini WTP dari Kemenkeu menggenapi tujuh kali WTP yang didapatkan Pemkab Bintang sejak 2011. Capaian ini tidak terlepas dari metode penerapan keuangan berbasis aktual yang dijadikan standar pelaporan Pemkab Bintang. Tujuh laporan harus disiapkan Pemkab Bintang setiap tahunnya agar masyarakat maupun pemerintah pusat mengetahui pengelolaan keuangan di Bintang.

Sumber: <http://batam.tribunnews.com/2018/09/20/pemkab-bintang-terima-lagi-wtp-dari-menteri-sri-mulyani-ini-ungkapan-bupati-apri-sujadi>, diunduh 29 September 2018

Berdasarkan berita di atas, pemerintah Kota Bintang telah menerapkan prinsip pemerintahan, yaitu

- akuntabilitas dan transparansi
- akuntabilitas dan berorientasi
- akuntabilitas dan strategis
- strategis dan transparansi
- strategis dan berorientasi

28. Pemerintah telah menciptakan berbagai situs atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang diberikan masyarakat akan bermanfaat bagi pemerintah demi terciptanya
- pemerintahan yang baik
 - persatuan dan kesatuan
 - keadilan masyarakat
 - kesejahteraan sosial
 - kemakmuran
29. Perhatikan gambar berikut!



Sumber: <http://10401596.siap-sekolah.com/pip-2016/>, diunduh 2 Oktober 2018

Gambar di atas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah munculnya faktor penghambat pemerintahan yang baik di bidang

- sosial
- politik
- hukum
- ekonomi
- pendidikan

30. Perhatikan berita berikut!

Pada 28 Agustus 2018 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di pengadilan negeri Medan. Mereka membawa empat hakim, termasuk ketua dan wakil ketua PN Medan, bersama dua panitera. Penangkapan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3630188/kpk-tangkap-4-hakim-dan-2-panitera-termasuk-ketua-dan-wakil-pn-medan>, diunduh 29 September 2018

Berita tersebut menggambarkan salah satu upaya reformasi yang dilakukan oleh KPK di bidang . . .

- a. sosial
- b. politik
- c. hukum
- d. ekonomi
- e. pendidikan

31. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip . . .

- a. kesatuan
- b. keserasian
- c. penyebaran
- d. pemberdayaan
- e. riil dan tanggung jawab

32. Tujuan penyerahan sebagian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah . . .

- a. agar pemerintah pusat lebih mudah mengatur jalannya pemerintahan
- b. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan
- c. memberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan pusat
- d. mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sehingga tidak perlu lagi campur tangan pemerintah pusat
- e. agar daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab

33. Perhatikan berita berikut!

Peringatan hari otonomi daerah menjadi penyemangat bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijakan daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah menitikberatkan pada . . .

- a. penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah
- b. semangat menerapkan nilai-nilai otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari

- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah setempat
- d. proses perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah
- e. pemberian pelayanan publik yang maksimal

34. Pembentukan kepolisian negara merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu bidang . . .

- a. fiskal
- b. yustisi
- c. keamanan
- d. pertahanan
- e. politik luar negeri

35. Perhatikan wacana berikut!

Daerah A, B, C, dan D berada dalam satu wilayah. Semua kepala daerah yang bersangkutan menghadiri forum diskusi untuk membahas pembentukan undang-undang megapolitan dalam rangka upaya pengelolaan terpadu di wilayah tersebut.

Wacana tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi . . .

- a. pemberdayaan
- b. pengayoman
- c. perlindungan
- d. pengaturan
- e. pelayanan

36. Pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas . . .

- a. desentralisasi dan sentralisasi
- b. desentralisasi dan tugas pembantuan
- c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah
- d. otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
- e. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

37. Perhatikan kutipan berita berikut!

Taatnya warga Desa Telaga, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam membayar pajak pada sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) mendapat apresiasi. Berdasarkan informasi pihak Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda) setempat, hampir seluruh warga Telaga sudah menyetorkan kewajibannya ke Dispenda.

Sumber: <https://www.borneonews.co.id/berita/33000-apresiasi-bagi-warga-telaga-taat-bayar-pajak>, diunduh 26 September 2018

Kutipan berita tersebut menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya karena

- a. pajak merupakan dana cadangan daerah
 - b. pajak merupakan salah satu dana perimbangan
 - c. pajak harus disetorkan kepada pemerintah pusat
 - d. pajak merupakan salah satu pendapatan asli daerah
 - e. ketaatan membayar pajak merupakan ciri warga negara yang baik
38. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mendapat otonomi khusus atau istimewa. Salah satu keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu
- a. terkenal sebagai Serambi Mekah bagi Indonesia
 - b. memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam
 - c. sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam
 - e. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
39. Pernyataan yang menunjukkan pengertian asas tertib penyelenggara negara adalah
- a. asas yang berorientasi pada upaya meminimalisasi penggunaan sumber daya
 - b. asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
 - c. asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
 - e. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

40. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan prinsip
- a. efisiensi
 - b. efektivitas
 - c. akuntabilitas
 - d. eksternalitas
 - e. kepentingan strategis nasional

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota!
2. Jelaskan secara singkat pembagian kekuasaan secara vertikal!
3. Mengapa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara?
4. Tuliskan pengertian penduduk menurut pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945!
5. Penduduk Indonesia menganut agama yang berlainan, ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Apakah fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agama?
6. Mengapa sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diamandemen?
7. Tuliskan perbedaan antara *governing bodies* dan *supporting bodies*!
8. Tuliskan fungsi pembagian kekuasaan pada suprastruktur politik!
9. Apa maksud dan tujuan otonomi daerah?
10. Jelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah!

Kunci Jawaban dan Pembahasan Remedial Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Kita hendaknya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pengamalan nilai sila kedua Pancasila antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antarsesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan, saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

2. **Jawaban: b**

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; hormat-menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda; serta saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dengan saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda akan terbina kerukunan hidup.

3. **Jawaban: c**

Warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia akan memiliki nasionalisme dan patriotisme sebagai bangsa Indonesia pula. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Adapun nilai lain yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila seperti rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. **Jawaban: d**

Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar."

5. **Jawaban: a**

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

6. **Jawaban: b**

Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

7. **Jawaban: b**

Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Negara

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”

8. **Jawaban: a**

Faktor dari dalam negeri yang menjadi penyebab krisis multidimensi antara lain terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga muncul perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika, serta masih lemahnya pengamalan agama dan munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit.

9. **Jawaban: b**

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

10. **Jawaban: b**

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tecermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. **Jawaban: c**

Kalimat ”Dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang” menjadi kunci menjawab soal ini. Kalimat tersebut berarti ketentuan dalam undang-undang dasar masih bersifat umum sehingga membutuhkan aturan operasional yang mampu menjelaskan maksud ketentuan dalam undang-undang dasar. Aturan operasional tersebut adalah

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Dengan demikian, jawaban paling tepat adalah pilihan **c**.

12. **Jawaban: e**

Pengetahuan tentang lagu-lagu nasional menjadi kunci menjawab soal ini. Lagu yang menggambarkan tentang luas wilayah Indonesia adalah ”Dari Sabang Sampai Merauke” karya R. Surarjo. Lirikanya, Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia.

13. **Jawaban: a**

Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Negara-negara lain yang hendak memasuki wilayah teritorial ini harus mendapat izin dari negara Indonesia.

14. **Jawaban: c**

Pernyataan pada soal merupakan pengertian penduduk. Pengertian penduduk dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

15. **Jawaban: a**

Angka **1)**, **2)**, dan **3)** merupakan pernyataan yang menunjukkan kriteria warga negara sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun pernyataan pada angka **4)** dan **5)** merupakan syarat bagi orang asing dalam mengajukan status kewarganegaraan Indonesia.

16. **Jawaban: c**

Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pilihan **a–e** menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, yang paling sesuai konteks soal adalah pilihan **c**. Aktor tersebut secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauannya sendiri. Dengan demikian, aktor tersebut akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

17. **Jawaban: a**

Dalam menjawab soal ini yang harus diketahui dua hal. *Pertama*, pengertian *ius sanguinis*, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. *Kedua*, asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia yaitu *ius soli* dan *sanguinis*. Berpatokan pada dua hal tersebut berarti anak pada soal akan memiliki kewarganegaraan ganda karena memperoleh kewarganegaraan dari ayahnya dan dari Indonesia.

18. **Jawaban: a**

Hak pada soal berkaitan dengan pemberlakuan *stelsel* aktif dan pasif. Berkaitan dengan *stelsel* tersebut, seorang warga negara pada dasarnya mempunyai dua opsi untuk memilih atau tidak dari salah satu *stelsel* tersebut. Opsi tersebut dikenal dengan istilah hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam *stelsel* aktif). Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (*stelsel* pasif).

19. **Jawaban: b**

Ketentuan dalam tanda kutip pada soal merupakan bunyi pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun pasal 29 ayat (1) berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Pasal 30 ayat (2) berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung". Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".

20. **Jawaban: d**

Pilihan **a-e** merupakan upaya pertahanan negara. Akan tetapi, yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar adalah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan terbentuk rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme). Keduanya merupakan modal awal upaya pertahanan negara.

21. **Jawaban: c**

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU dapat melakukan sosialisasi terkait pemilu sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Misalnya, KPU Kota Surabaya memberikan sosialisasi kepada peserta didik kelas X di seluruh sekolah yang ada di Surabaya. KPU dapat menjelaskan alur proses pemilihan umum mulai dari C6 yang akan diterima pemilih hingga tahapan yang harus dilakukan saat berada di tempat pemungutan suara (TPS).

22. **Jawaban: c**

Nepotisme adalah kecenderungan perilaku mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan di lingkungan pemerintah. Tindakan Pak Supri telah melanggar peraturan yang berlaku. Ia telah menyelewengkan kewenangan yang dimiliki untuk maksud dan tujuan lain.

23. **Jawaban: b**

Keberhasilan dan kemenangan partai politik dalam pemilihan umum tergantung pada besarnya dukungan masyarakat. Tanpa adanya cabang atau perwakilan di daerah-daerah, partai politik akan kesulitan menjalankan fungsinya. Kegiatan politik partai akan terputus dan akan kesulitan memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Akibatnya, proses politik akan terhambat.

24. **Jawaban: c**

Hak imunitas berarti hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat sesuai peraturan perundang-undangan. Hak yang dimiliki MPR di antaranya hak imunitas, protokoler, interpelasi, dan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

25. **Jawaban: e**

Mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Presiden dapat memberhentikan menteri dengan pertimbangan yang termuat dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa menteri dapat diberhentikan dengan alasan kurang efisien dan efektifnya kinerja pemerintah.

26. **Jawaban: c**

Sesuai amanat undang-undang, DPR merupakan pihak yang diberikan kewenangan secara konstitusi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lain, termasuk Bank Indonesia. Akan tetapi, DPR dibantu oleh Bank Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang dibentuk berdasarkan undang-undang. BSBI bertanggung jawab langsung kepada DPR serta tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia.

27. **Jawaban: a**

Akuntabilitas berarti pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan. Transparansi berarti pemerintah memberikan kejelasan terkait sebuah informasi yang menimbulkan keraguan. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang riskan. Akan timbul pemikiran masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan pejabat pemerintah. Diraihnya WTP oleh Pemkab Bintan menandakan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan dengan bijak. Laporan keuangan yang diberikan kepada Kemenkeu membuktikan bahwa Pemkab Bintan telah bertanggung jawab terhadap wewenang yang telah diamanahkan.

28. **Jawaban: a**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung pemerintahan yang baik. Adanya berbagai situs maupun aplikasi yang dibuat pemerintah menandakan bahwa pemerintah telah bersikap transparan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan situs atau aplikasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi berupa kritikan, masukan, maupun saran terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah.

29. **Jawaban: d**

Gambar pada soal merupakan kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai bentuk bantuan pangan nontunai (BPNT). BPNT diberikan sebulan sekali untuk mengurangi beban ekonomi sekaligus menjamin nutrisi yang seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

30. **Jawaban: c**

Lemahnya sistem hukum akan berdampak pada ketidakpercayaan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK merupakan upaya untuk memperbaiki elemen-elemen penegak hukum. Reformasi di bidang hukum perlu dilakukan untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

31. **Jawaban: a**

Terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu prinsip kesatuan, prinsip keserasian, prinsip penyebaran, prinsip pemberdayaan, prinsip riil, dan tanggung jawab. Prinsip kesatuan berarti pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

32. **Jawaban: e**

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat itu sebagian diserahkan kepada daerah-daerah. Tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat adalah agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Hak untuk mengatur daerahnya sendiri disebut otonomi. Daerah yang diserahi wewenang oleh pemerintah pusat tersebut disebut daerah otonom.

33. **Jawaban: a**

Pada dasarnya otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang memperhatikan kondisi, potensi, kebutuhan daerah, serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat daerah dapat terakomodasi dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

34. **Jawaban: c**

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan absolut adalah keamanan. Kewenangan dalam bidang keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, serta menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.

35. **Jawaban: d**

Pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat agar berjalan dengan baik. Fungsi pengaturan pemerintah bertujuan untuk mengatur dan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Wacana tersebut berisi tentang pembahasan rencana pembentukan undang-undang megapolitan untuk mengatur dan mengelola wilayah tersebut secara terpadu.

36. **Jawaban: e**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sesuai pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adapun dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

37. **Jawaban: d**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan kepatuhan membayar pajak berarti masyarakat turut serta memberikan masukan bagi daerah. Pemasukan daerah yang lancar akan mendorong kelancaran pembangunan daerah.

38. **Jawaban: e**

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon Gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta.

39. **Jawaban: d**

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah asas tertib penyelenggaraan

negara. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

40. **Jawaban: e**

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat provinsi berlangsung antara pemerintah provinsi (gubernur atau wakil gubernur) dan DPRD provinsi. Pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota (bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota) dan DPRD kabupaten ataupun kota.

2. **Jawaban:**

Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Uraian dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

3. **Jawaban:**

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi monopoli oleh

seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia secara merata.

4. **Jawaban:**

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengertian penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

5. **Jawaban:**

Negara Indonesia adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama. Artinya, Indonesia mengakui dan mengimani Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar pemerintahan. Indonesia menghormati keragaman agama dan membebaskan penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

6. **Jawaban:**

Sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diamandemen, jabatan presiden dan wakil presiden tidak dibatasi. Akan tetapi, setelah amandemen kekuasaan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua periode. Presiden juga tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, tetapi mengajukan RUU kepada DPR. Selain itu, amandemen terhadap sistem ketatanegaraan dilakukan karena terdapat lembaga yang dirasa kurang efisien, seperti DPA. DPA dihapuskan dari sistem ketatanegaraan karena hanya berperan memberikan saran kepada presiden tanpa ikut terlibat dalam kewenangan politik dan hukum. Penambahan lembaga negara juga dirasa perlu untuk memperkuat lembaga yang telah ada. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Amandemen mempertegas badan kehakiman yang dimaksud dengan menambahkan lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, amandemen perlu dilakukan untuk mempertegas ketentuan sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

7. **Jawaban:**

Governing bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung. Sementara *supporting bodies* adalah struktur politik yang mendukung *governing bodies* dan tidak melakukan fungsi pemerintahan. *Governing bodies* terdiri atas presiden dan/atau

wakil presiden, dewan pertimbangan presiden, kementerian negara, dan pemerintah daerah. *Supporting bodies* meliputi elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta lembaga kepolisian negara.

8. **Jawaban:**

Pembagian kekuasaan pada suprastruktur politik memiliki fungsi, yaitu membuat undang-undang (*rule making*), melaksanakan undang-undang (*rule application*), serta mengawasi dan mengadili pelaksanaan undang-undang (*rule adjudication*).

9. **Jawaban:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhasan, serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. Adanya otonomi daerah merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan dalam kewenangan yang menjadi hak daerah.

10. **Jawaban:**

Hubungan struktural adalah hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menitikberatkan pada struktur organisasi atau kelembagaan. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang melaksanakan tugas pemerintah sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan pusat mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat di daerah, sedangkan pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan-peraturan dari pusat.